

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank**

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (*interbank call money*) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:68), yaitu :

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Adapun jenis bank berdasarkan fungsinya menurut UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 yang ditegaskan lagi dengan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum dan dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi tersebut, maka pada dasarnya kegiatan usaha bank dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Sisi kewajiban dan equitas, adalah kegiatan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Sisi aktiva, adalah kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana terutama dimaksudkan untuk mempeoleh keuntungan.
3. Sisi jasa-jasa, adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jasa-jasa dalam mekanisme pelayanan kepada nasabah.

## **2.2 Bentuk Hukum Bank**

Berikut ini merupakan bentuk hukum dari bank:

### **A. Bentuk Hukum Bank Umum**

- a). Perusahaan perseroan (Persero).
- b). Perusahaan Daerah
- c). Koperasi
- d). Perseroan Terbatas

### **B. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat**

- a). Perusahaan Daerah
- b). Koperasi
- c). Perseroan Terbatas, dan
- d). Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **2.3 Profil PT. Bank Riau Kepri**

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50.

Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor: C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Tahun 2004 adalah tahun bersejarah bagi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun ini, Riau kepulauan berpisah dari riau daratan, dan membentuk provinsi baru, yakni Provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya tanggal 1 juli 2004. Alasan kuat terbentuknya provinsi Kepulauan Riau saat itu adalah faktor luasnya wilayah. Meskipun demikian, pemekaran dua provinsi ini hanyalah pemisahan administratif saja. Pemekaran ini tidaklah menjadikan dua provinsi ini hilang persaudaraan. Identitas melayu masih melekat di dua provinsi ini.

Setelah benar-benar berpisah secara administratif, kini dua provinsi berkebudayaan melayu ini kembali disatukan oleh sebuah bank daerah. Ini ditandai dengan berubahnya nama bank pembangunan daerah riau (BPD Riau) menjadi Bank Riau Kepri sebagai wujud mengakomodir dua provinsi yang tidak lagi bersatu sejak tahun 2004. Bank Riau Kepri yang dulunya bernama Bank Riau ini, baik secara nama maupun kepemilikan, tidak hanya milik masyarakat Riau namun kini juga telah menjadi milik masyarakat Kepulauan Riau. Dengan perlaihan nama ini, Bank Riau Kepulauan Riau menjadi salah satu perekat antara dua provinsi tersebut.

Peresmian peralihan nama Bank Riau menjadi Bank Riau Kepri dilaksanakan pada Rabu, 13 Oktober 2010, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Logo perusahaan yang dulunya PT. Bank Riau kini menjadi PT. Bank Riau Kepri. Peralihan nama dan logo Bank Riau Kepri ini merupakan wujud kerjasama yang erat antara Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah melalui dunia perbankan. Selain itu, dengan adanya Bank Riau Kepri ini dapat mempererat persatuan dua provinsi dalam satu komitmen bersama dengan mendukung keberadaan Bank milik dua provinsi ini, untuk dapat memberi manfaat bagi masyarakat di Riau dan Kepri.

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010. Perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.

### **2.3.1 Layanan dan Produk**

Dengan spirit baru untuk berkompetisi, Bank Riau Kepri akan menjadi mitra usaha untuk mendorong pertumbuhan daerah sebagai bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Mandat yang diamanatkan shareholders kepada Bank Riau Kepri, dikristalisasikan pada Visi dan Misi Perusahaan, terutama sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjadikan peran strategis Bank Riau Kepri teramat penting dalam pengejawantahannya. Proses revitalisasi pun dilakukan guna mendorong tercapainya misi dan peranan utama bank sebagai lembaga intermediasi disamping juga fungsi pelayanan kepada masyarakat. Proses pembangunan jaringan distribusi, rekombinasi komposisi dana

pihak ketiga, perluasan derivatif produk dan jasa serta peran teknologi informasi yang mutakhir sebagai back bone bisnis Bank Riau Kepri terus menjadi perhatian.

Untuk itu Perubahan menjadi kata kunci mendasar yang dilakukan pada seluruh aspek organisasi Bank Riau Kepri dalam rangka mengantisipasi tingkat persaingan bisnis yang semakin kompetitif untuk selanjutnya turut pula memberikan nilai bagi stakeholders. Langkah awal yang telah dilakukan oleh Bank Riau Kepri merupakan moment yang sangat tepat untuk selanjutnya memberikan warna dan nafas baru dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara signifikan, penajaman kembali visi, misi, strategi dan target yang dirumuskan dalam rencana bisnis bank. Oleh karenanya, strategi yang telah dicanangkan manajemen yang terfokus melalui Konsep Pelayanan Prima kepada nasabah dengan formulasi bisnis yang fokus pada segmen pasar, tercermin dari reorganisasi struktur perusahaan menjadi berbasis Strategic Business Unit (SBU), peningkatan jaringan distribusi yang didukung teknologi informasi dan sumber daya manusia yang professional.

Dengan mengusung tema sentral “Reaching The Exelence” Bank Riau Kepri berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada nasabah dan pemegang saham melalui redefinisi paradigma bisnis bank ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan dengan motto “The Spirit to Grow” -tumbuh dan tumbuh menuju yang terbaik. Komitmen kami adalah memberikan layanan perbankan dengan lebih baik lagi kepada setiap nasabah. Kami akan mengembangkan berbagai produk layanan untuk memenuhi kebutuhan perbankan bagi setiap nasabah.

## **1. Produk Treasury & Internasional**

### **a) Giro Valas**

Giro Valas Bank Riau Kepri adalah bertujuan untuk mempermudah urusan bisnis global dan lebih aman. Kelancaran transaksi dalam Valuta asing adalah keharusan di era global. Bank Riau Kepri mempersembahkan Giro Valas Bank Riau Kepri yaitu rekening simpanan dalam valuta asing yang ditujukan untuk mendukung kelancaran aktivitas bisnis.

Keuntungan yang di dapatkan :

1. Kemudahan dan kenyamanan bertransaksi

- Leluasa memilih jenis mata uang yang di inginkan (USD, SGD, Euro)

- Rekening koran Giro Valas dapat diperoleh tiap bulan

- Mempermudah penerbitan Referensi Bank

- Pilihan penyetoran dan penarikan dana sesuai pilihan.

- Dapat ditransfer ke rekening yang inginkan.

2. Biaya penyetoran dan penarikan ringan

- Penyetoran tunai dalam bentuk bank notes USD ke rekening Giro Valas bank riau USD tidak dikenakan kurs jual beli

- Penarikan tunai dalam bentuk bank notes USD dari rekening Giro Valas Bank Riau Kepri USD tidak dikenakan kurs jual beli maupun biaya propisi hingga jumlah penarikan USD 10.000 per bulan

3. Jasa giro yang menarik

- Jasa giro di hitung berdasarkan saldo harian yang dikreditkan ke rekening Giro Valas setiap akhir bulan.

## **2. Produk Mikro**

a) KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)

Adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. KKP-E bermanfaat membantu petani/peternak di bidang permodalan untuk dapat menerapkan teknologi sehingga produktifitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik serta meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

b) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)

Merupakan solusi terbaik untuk memiliki kendaraan bermotor, Mobil dan sepeda motor bagi anda dan keluarga dengan proses mudah, cepat dan bersahabat. Dengan KKB Bank Riau memiliki kendaraan idaman bukan lagi impian, KKB

Bank Riau diberikan untuk pembelian/pembiayaan kendaraan baru ataupun lama yang dijual melalui dealer atau non dealer.

c) KMK (Kredit Modal Kerja) bagi Developer/Pengembang

Skim Kredit untuk membantu developer / pengembang untuk mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan perumahan baik berupa pembangunan Konstruksi Rumah maupun berkaitan dengan Sarana dan Prasarana. KMK Developer dari Bank Riau proses cepat dengan persyaratan mudah, maksimum plafond kredit sebesar 80% dari kebutuhan modal kerja konstruksi bangunan dan jangka waktu kredit adalah 24 bulan namun dapat diperpanjang dengan suku bunga bersaing.

d) KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

Kredit untuk memiliki rumah idaman bagi anda dan orang yang anda cintai. Dengan KPR melalui Bank Riau dapat membeli tanah atau kavling untuk perumahan, ruko, rumah susun, apartemen, membangun rumah tinggal/ruko, renovasi rumah tinggal/ruko, rumah susun atau apartemen. Persyaratan kredit yang mudah dengan maksimum plafon kredit Rp 2.000.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun.

e) KUMK (Kredit Usaha Mikro dan Kecil) SUP 005

Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005) merupakan kredit modal dan investasi yang diberikan kepada usaha mikro kecil guna pembiayaan usaha produktif. Bermanfaat untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi.

f) Kredit BPD Peduli

Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok Usaha Kecil Berbasisi Kerakyatan (UKBK) dimana kelompok tersebut telah dibina dengan metodologi BPD Peduli oleh Pihak Bank dan atau Pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank. Kredit BPD Peduli bermanfaat membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi dengan maksimum plafond Rp 5.000.000,- per anggota kelompok dan tidak dikenakan biaya prrovisi dan biaya administrasi.



g) KRETA (Kredit Tanpa Agunan)

Merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat pelaku ekonomi yang bersifat produktif baik untuk modal kerja maupun investasi untuk pengembangan usaha disektor perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa dan sektor produktif lainnya. Kreta bermanfaat membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kecil dan investasi. Kredit yang diberikan tanpa agunan.

h) KPK (Kredit Pengusaha Kecil)

Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil secara perorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi. Syarat dan proses mudah, plafon yang diberikan diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- dan nasabah dapat mengajukan permohonan sekaligus untuk jenis kredit modal kerja dan investasi.

i) KPM (Kredit Pengusaha Mikro)

Kredit yang diberikan kepada pengusaha Mikro dan Kecil produktif, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi untuk mengembangkan usaha dengan proses yang mudah, membantu masyarakat untuk mendapatkan sekaligus kredit modal kerja dan investasi dengan plafon maksimal Rp 50.000.000,-

j) Kedai Bank Riau

Merupakan salah satu jaringan kantor yang menjadi sarana dari Bank Riau untuk pengusaha mendapatkan Kredit Modal Kerja dan Investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil yang difokuskan pada domisili usaha yang berada di kecamatan dimana Kedai Bank Riau berdomisili guna pembiayaan usaha produktif.

### **3. Produk dan Jasa**

a) Tabungan Sinar Belia

Tabungan bagi Pelajar dan Mahasiswa yang masih berstatus aktif atau masih dalam usia sekolah maksimal 28 tahun. Dengan setoran awal yang ringan hanya Rp 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 20.000,- dan biaya administrasi bulanan yang ringan hanya Rp 2.500,-. Gratis biaya tarik tunai di jaringan ATM Bank Riau, Jaringan ATM bersama dan ATM Prima (ATM BCA)

selain itu kartu ATM Tabungan dapat menjadi kartu pelajar atau kartu Mahasiswa untuk sekolah/universitas yang memiliki kerjasama khusus.

b) Tabungan Sinar Pendidikan

Tabungan bagi demi masa depan pendidikan putera-puteri anda, selain berhadiah puluhan beasiswa pendidikan juga mendapatkan proteksi Asuransi Jiwa Tabungan Sinar Pendidikan dari AIA Indonesia sehingga putera-puteri anda akan tetap memperoleh target dana yang diinginkan meskipun sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jangka waktu kepesertaan yang fleksible 1-10 tahun di seluruh jaringan cabang Bank Riau dan suku bunga tabungan tinggi yaitu 5% serta biaya administrasi yang ringan hanya Rp 3.000,- /bulan.

c) Tabungan Sinar

Merupakan produk andalan Bank Riau dengan konsep budaya Riau dan Kepri yang mengandung arti Simpanan Amanah Riau. Tabungan Sinar menjadi icon kebanggaan masyarakat tua dan muda. Manfaat lebih, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan lainnya.. Setoran awal yang ringan hanya Rp 50.000,- dan biaya administrasi bulanan yang ringan hanya Rp 2.500,-. Memiliki jaringan ATM yang luas, dapat ditarik tunai di jaringan ATM Bank Riau, Jaringan ATM bersama dan ATM Prima (ATM BCA).

#### **4. Produk Syariah**

a) Pembiayaan iB Pengusaha Kecil. mitra terpercaya penggiat usaha

Disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi dengan prinsip murabahah. Tujuan untuk membantu pengusaha kecil mendapatkan pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi baik secara perorangan maupun secara kelompok. Usaha yang dibiayai adalah semua sektor-sektor ekonomi yang produktif terkecuali sektor-sektor ekonomi yang dilarang berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

b) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaran bermotor murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, Pensiunan, Pekerja Profesi ,

dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan atau roda 4 (empat).

Apa syarat untuk memperoleh pembiayaan kendaraan bermotor?

1. calon nasabah tidak tercatat sebagai nasabah bermasalah.
2. membuka rekening tabungan di Bank Riau Syariah.
3. mengisi formulir permohonan yang disediakan Bank dan disetujui suami/istri.
4. menyerahkan dokumen – dokumen yang harus disertakan dalam map aplikasi.

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini (biaya administrasi, biaya materai, notaris dan asuransi harus disetorkan langsung ke rekening Bank Riau Syariah.

c) Pembiayaan iB Niaga Prima

Pembiayaan iB Niaga prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.

Objek yang dapat dibiayai :

1. Penyewaan toko, gedung, mesin-mesin/peralatan dll
2. Barang dagangan
3. Toko/Swalayan/Toserba/Waserba
4. Alat-alat bangunan pada toko bangunan
5. Kebutuhan rumah makan & restoran
6. Alat-alat pada Apotik
7. Dan lain-lain

d) Tabungan iB dan Simpanan Amanah Riau ( SINAR )

Tabungan iB SINAR adalah tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini , tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dalam arti dana tabungan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara professional dan memenuhi kaidah syari'ah. Keuntungan dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nasabah) yang disepakati dimuka.

e) Pembiayaan iB Pemilikan Rumah. Mitra terpercaya untuk pemilikan rumah idaman

Pembiayaan iB Pemilikan rumah bersedia membantu pegawai yang berpenghasilan tetap,pekerja propesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun /kondominium, ruko, kios, rukan,apartemen,vila dan kavling siap bangun dengan prinsip murabahah. Keuntungan dari iB pemilikan rumah ini adalah :

1. Uang Muka Ringan
  2. Proses Cepat Dan Murah
  3. Harga Murah
  4. Angsuran Tetap
  5. Jangka Waktu Fleksibel
- f) Gadai Emas iB (Rahn). solusi dana cepat sesuai syariah.

Gadai Emas iB (Rahn Emas) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Riau Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai. Manfaat dan Kegunaanny antara lain yaitu :

1. Solusi dana cepat sesuai syariah
2. Proses cepat, tak perlu waktu lama untuk memperoleh uang tunai
3. Persyaratan mudah dan ringan
4. Persyaratan mudah dan ringan
5. Biaya relative murah
6. Dilaksanakan sesuai dengan syari'ah sehingga memberikan hasil yang barokah
7. Ada ketentruman karena barang aman
8. Jangka waktu pinjaman sampai 6 (enam)bulan dan dapat diperpanjang

g) Pembiayaan iB KARYA PRIMA. Mitra Terpercaya dalam pembangunan

Pembiayaan iB karya Prima membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. Objek yang dapat dibiayai antara lain yaitu :

1. Pembangunan gedung/bangunan
2. Pembangunan jembatan /jalan raya
3. Pengadaan barang dan jasa

#### 4. Pekerjaan fasilitas umum / konstruksi lainnya

##### h) iB Dhuha Tabungan Haji dan Umrah

Adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), Haji plus dan umrah. Kini tabungan iB Dhuha hadir dalam 2 (dua) skema syariah.

Pertama, simpanan yang bersifat titipan /wadiah (Dhuha Bebas) sehingga nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan haji/umrah serta bebas menentukan nominal setoran berdasarkan kemampuan.

Kedua, simpanan dengan kontrak bagi hasil/mudharabah antara Bank dan nasabah (Dhuha Terencana) dimana nasabah akan memperoleh porsi (nisbah) bagi hasil dari keuntungan usaha Bank namun waktu keberangkatan serta jumlah setoran perbulanannya telah direncanakan sesuai dengan keinginan nasabah. Tujuan dari iB dhuha ini adalah :

1. Membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji regular (selama masih tersedia), haji plus dan umrah.
2. Memberikan keuntungan bagi nasabah dengan memberikan bagi hasil selain merencanakan ibadah haji.

##### i) Giro iB Solusi Mudah Transaksi Bisnis anda

Adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip wadiah (titipan) yang menawarkan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah pem bukuan. Dengan giro iB maka nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer, dana dan pembayaran tunai sewaktu - waktu. Dengan rekening giro ini membantu anda melakukan pembayaran maupun penyetoran atas transaksi keuangan secara praktis. Keuntungan dan manfaat yaitu :

1. Fleksibilitas dalam bertransaksi
2. Dapat digunakan sebagai referensi Bank
3. Meningkatkan citra pribadi dari perusahaan
4. Memberi kemudahan dan kenyamanan
5. Praktis dan Akurat

##### j) Pembiayaan iB Aneka Guna

Pembiayaan iB Aneka Guna adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan pembangunan/rehabilitasi/renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan iB Aneka Guna juga dapat diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh Nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya. Persyaratannya :

1. Calon Nasabah tidak tercatat sebagai nasabah bermasalah
  2. Memiliki rekening tabungan di bankriau syariah
  3. Mengisi formulir permohonan yang disediakan bank dan disetujui istri/suami
  4. Menyerahkan dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam map aplikasi.
- k) Deposito iB investasi yang aman dan barokah

Deposito iB Bank Riau adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank. Produk ini hadir agar simpanan anda di Bank diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dan mendapat bagi hasil atas hasil usaha Bank. Melalui deposito iB Bank Riau akan memperoleh barokah dan mendapatkan bagi hasil yang akan dilimpahkan secara langsung ke rekening setiap bulan. Keuntungannya adalah :

1. Bagi hasil lebih adil
2. Fleksibel jangka waktu 1,3,6,& 12 bulan
3. Diutamakan sebagai agunan pembiayaan
4. Dokumen yang diperlukan

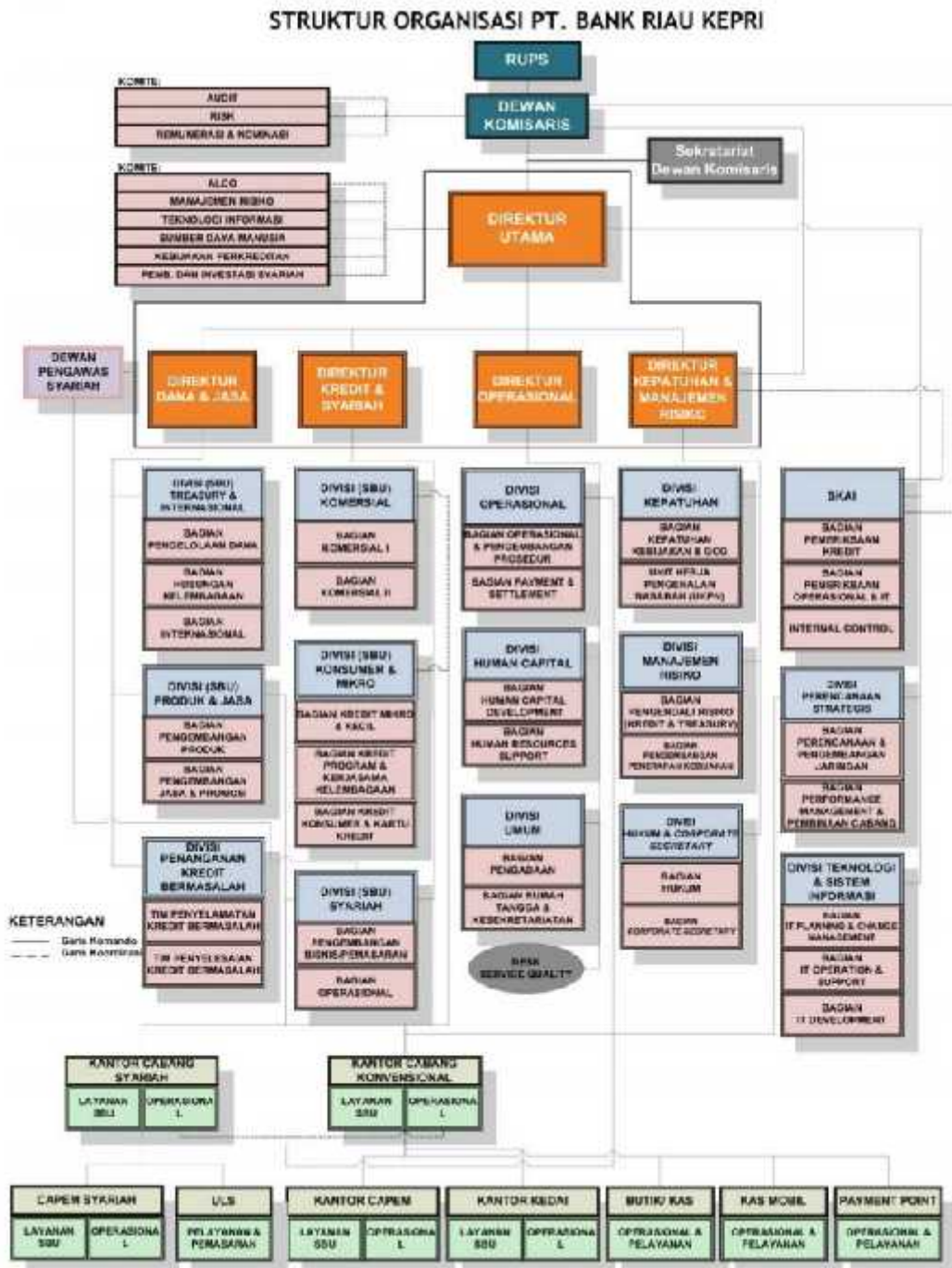
### **2.3.2 Jumlah Jaringan Kantor**

Saat ini PT. Bank Riau Kepri memiliki 19 Kantor Cabang, 35 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kedai, 24 Kantor Kas, 4 Butik, 2 Payment point, 50 Unit Layanan Syariah, 120 ATM, 2 Kas Keliling/Oto Banking yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Riau. Dari hasil laporan tahunan Annual report dari tahun ke tahun tercatat peningkatan layanan setiap tahunnya. Maka dari itu PT.

Bank Riau Kepri selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas demi memuaskan para nasabahnya.

Selanjutnya, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerjanya Rencana Bisnis Bank di tahun 2010, Bank Riau Kepri terus membangun dan meningkatkan pelayanan jaringan kantor serta mengembangkan segmen consumer, komersial, dan syariah. Namun di sisi lain, Bank Riau Kepri tetap memberikan keberpihakannya kepada usaha kecil dan mikro yaitu dengan terus mengembangkan segmen tersebut sesuai dengan misi bank yakni membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan memperluas jaringan kantor dan ATM dari kota sampai ke desa, tentunya akan mengatasi kendala daya jangkau Bank Riau Kepri terhadap kebutuhan layanan perbankan di masyarakat Riau dan Kepri terhadap kebutuhan layanan perbankan di masyarakat Riau dan Kepri.

### 2.3.3 Struktur PT. Bank Riau Kepri



Gambar 2.1 Struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri



#### **a) Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara independen.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Secara garis besar, selama tahun 2010 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain :

1. Menyetujui perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Bank dengan memperhatikan hasil keputusan RUPSLB.
2. Persetujuan penetapan pejabat Direktur pada SOT baru dan perubahan kebijakan Direksi terkait Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
3. Meminta penjelasan Direksi mengenai fungsi Corporate Secretary.
4. Membahas agenda RUPS tahun buku 2009.
5. Meminta Direksi agar segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkembang secara internal.
6. Persetujuan revisi target perolehan laba tahun 2010.
7. Meminta penjelasan dan penyampaian laporan progres penyelesaian kredit bermasalah PT.Saras Perkasa.

8. Meminta kepada Direksi agar sebaiknya menambah karyawan pada Divisi SKAI agar dapat melakukan sistem pengawasan yang lebih intensif k arena banyaknya kantor Bank yang dibuka.
9. Direksi agar fokus kepada upaya penghimpunan dana pihak ketiga agar tercapai struktur sumber pendanaan Bank yang sehat

#### **b) Direktur Utama**

Tugas dari direktur utama bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pengurusan dan pengelolaan Bank guna menjamin keterpaduan dan kelancaran tugas – tugas Bank. Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum perseroan berdasarkan prinsip kehematan, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi dan tujuan perseroan. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh direktur. Menyiapkan rencana jangka panjang (Corporate Plan), rencana jangka menengah (Business Plan) dan rencana kerja anggaran tahunan. Menyampaikan Laporan Tahunan Kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan di tutup. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah – langkah yang diperluas agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern (Divisi SKAI). Menciptakan dan memelihara system pengendalian intern yang ditetapkan Bank. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu system komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank.

#### **c) Direktur Dana dan Jasa**

Bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Divisi- divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi (SBU) Treasury dan Internasional, Divisi (SBU) Produk dan Jasa dan

Divisi Penanganan Kredit Bermasalah serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d) Direktur Kredit dan Syariah**

Bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Divisi- divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi (SBU) Komersial, Divisi (SBU) Konsumer dan Mikro, dan Divisi (SBU) Syariah serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e) Direktur Operasional**

bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Divisi- divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Operasional, Divisi Human Capital, Divisi Umum dan Desk Service Quality serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko**

membawahi Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum dan Corporate Secretary dan Divisi Manajemen Risiko. Bertugas menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Kemudian PT. Bank Riau Kepri Mempunyai Divisi yang masing – masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan guna mencapai target yang telah direncanakan oleh Bank. diantaranya yaitu :

**1. Divisi (SBU) Treasury & Internasional**

Fungsi utama dari divisi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan valuta asing ( USD,EURO,SGD ) baik dalam bentuk fisik ( Bank Nota ) maupun untuk keperluan transfer. Tujuan dari unit internasional secara keseluruhan adalah

untuk memperluas keuntungan melalui penyediaan jasa, baik dalam bentuk valuta asing ataupun transaksi – transaksi pembiayaan lainnya seperti SKBDN.

## **2. Divisi (SBU) Komersial**

Fungsi utamanya adalah menyalurkan dan memutuskan kredit diatas wewenang kantor cabang kemudian mengawasi dan memonitor NPL ( kualitas kredit cabang ). Tujuan dari unit komersial adalah mencapai income kredit yang telah ditargetkan dari setiap unit.

## **3. Divisi Operasional**

Tugas utama dari Divisi Operasional ini adalah Menyusun dan Mensosialisasikan SOP (Standar operasional pelayanan), Menyusun laporan keuangan, Menyampaikan laporan Bank ke pihak regulator. Kemudian tujuan dari masing – masing unit adalah memantau penerapan SOP, mempersiapkan laporan keuangan bagi pihak internal dan eksternal.

## **4. Divisi Kepatuhan**

Adapun tugas utama dari divisi kepatuhan ini adalah :

- a. Melaksanakan, memonitor dan mengendalikan kegiatan nasabah melalui laporan internal, profil transaksi dan rekening nasabah.
- b. Memonitor transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- c. Melakukan penyempurnaan sistem untuk mendukung program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris (APU dan PPT)
- d. Melakukan pengujian dan penelitian aspek kepatuhan sehubungan dengan rencana produk/jasa serta memberikan dukungan /solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit kerja unit bisnis dan unit kerja terkait.
- e. Melakukan pengujian dan penelitian aspek kepatuhan sehubungan dengan rancangan kebijakan yang akan diputuskan oleh Direksi.

- f. Melakukan pengujian dan penelitian aspek kepatuhan sehubungan dengan keputusan pemberian kredit, rencana penyediaan dana dalam kewenangan memutus Direksi.
- g. Menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Direktur kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- h. Bertanggungjawab terhadap internalisasi pelaksanaan GCG
- i. Mereview kebijakan internal yang ada dibandingkan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

#### **5. Divisi SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)**

Berdasarkan Struktur Organisasi (SOT) Bank Riau Kepri, Divisi SKAI berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama. Adapun tugas dan tanggung jawab divisi SKAI yaitu antara lain :

##### **Tugas dan Tanggungjawab SKAI**

1. Menyusun rencana audit tahunan berdasarkan risiko serta melaporkan realisasinya setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi audit dari rencana tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3. Melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
4. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
5. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaporkan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit serta atas setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Bank Indonesia.
6. Mengajukan Anggaran Tahunan untuk tahun yang akan datang serta melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester.
7. Menyusun (mereview) kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah mengacu pada Audit Charter, dan untuk Tugas Satuan Kerja Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya Bank Riau Kepri, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank Riau Kepri, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (risk based).
2. Melakukan audit terhadap hal-hal diluar rencana yang dimaksud pada butir di atas atas dasar permintaan pihak internal maupun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif Divisi SKAI yang disetujui oleh Direktur Utama Bank.
3. Melakukan audit sesuai permintaan Direksi, Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang mengandung indikasi fraud.
4. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank Riau Kepri untuk memberikan nilai tambah (value added) sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Divisi SKAI

#### **6. Divisi ( SBU ) Produk dan jasa**

Fungsi utama dari Divisi Produk dan Jasa adalah menciptakan produk perbankan sehingga terciptanya produk produk dan jasa yang berkualitas. Fungsi dari masing – masing unit diantaranya yaitu pembuatan, pengembangan serta pengawasan terhadap produk dan jasa yang ada di divisi produk dan jasa tersebut.

#### **7. Divisi ( SBU ) Konsumer & Mikro**

Tugas pokok Divisi Konsumer & Mikro yaitu Membina divisi pelayanan (SBU) Konsumer dan lembaga keuangan lain yang berhubungan dengan kepentingan bisnis konsumer kemudian mengusahakan dan memelihara sumber daya pihak ketiga yang potensial serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

## **8. Divisi Penanganan Kredit Bermasalah**

Adapun garis besar tugas divisi penyelesaian kredit bermasalah (PKB) antara lain: *Non Performing Loan* (NPL) dan kredit hapus Buku; Kegiatan penyelamatan (Restrukturisasi) kredit dan penyelesaian kredit bermasalah; Analisis pengusulan kepada direksi mengenai penyelesaian kredit macet yang diajukan kantor cabang untuk dihapusbukukan; Analisis kredit bermasalah dalam rangka dalam rangka hapus tagih sesuai ketentuan; Mengevaluasi kegiatan penanganan kredit bermasalah yang meliputi; *Non Permoforming Loan* (NPL) dan pelaporan secara periodik; kredit yang telah dilakukan penyelamatan (Restrukturisasi) dan pelaporan secara periodik; Kredit yang ditempuh langkah penyelesaian dan pelaporannya secara periodik.

## **9. Divisi ( SBU ) Syariah**

Tugas dari divisi Syariah ini adalah merencanakan, melaksanakan dan evaluasi pemasaran cabang syariah, membina hubungan baik dengan departemen agama serta memantau proses pengelolaan pendaftaran haji melalui sistem komputerisasi haji (siskohat). Beberapa produk simpanan perbankan syariah diantaranya :

Produk Dana :

- a). Tabungan iB Sinar.
- b). Tabungan iB Dhuha.
- c). Tabungan iB Sinar Belia.
- d). Tabungan iB Sinar Delima.
- e). Tabungan iB Sinar Pendidikan.
- f). Giro iB Wadiah.
- g). Giro iB Mudharabah.
- h). Deposito iB Syariah

Pembiayaan :

- a). Pembiayaan Rekening Koran Syariah.
- b). Pembiayaan Musyarakah.
- c). Pembiayaan iB Mitra Swadaya (Diferensiasi pembiayaan mikro iB Pengusaha Kecil).

- d). Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).
- e). Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB).
- f). Pembiayaan Aneka Guna (PAG).
- g). Ijarah.
- h). Itishna'.
- i). Pembiayaan Aneka Guna Syariah.
- j). Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah.
- k). Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah.
- l). Pembiayaan Tanpa Agunan.
- m). Qardh.
- n). Rahn Emas.

#### **10. Divisi Human Capital**

- a). Menyusun program penghasilan dan kesejahteraan komisaris, direksi dan pegawai bank.
- b). Menyelenggarakan, memonitor dan mengendalikan seluruh pendidikan dan latihan baik yang diselenggarakan secara internal, bekerjasama dengan pihak eksternal, maupun mengirim ke lembaga pendidikan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c). Bertanggung jawab dalam program pengembangan dan kaderisasi pegawai.
- d). Bertanggung jawab dalam penetapan dan penilaian KPI

#### **11. Divisi Umum**

- a). Memelihara dan melakukan pengadaan seluruh gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan inventaris bank baik milik sendiri maupun sewa.
- b). Bertanggungjawab dalam perumusan atau evaluasi sistem dan prosedur di lingkungan divisi umum.
- c). Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perayaan dan hari besar.



d). Memelihara semua barang inventaris kantor pusat dan mengadministrasikan dokumen-dokumen bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.

e). Mendukung dan mengeksekusi semua penyelesaian biaya dan pemilihan vendor rekanan untuk promosi dalam upaya percepatan kegiatan promosi bank.

## **12. Divisi Manajemen Resiko**

Adapun tugas-tugas divisi manajemen resiko meliputi :

a). Mengelola kebijakan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya

b). Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMCO dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya.

c). Mengembangkan metode dan modul pengukuran risiko.

d). Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR)

e). Mengembangkan perangkat aplikasi pengukuran dan pengendalian risiko.

f). Melakukan kajian risiko atas usulan produk atau aktivitas baru serta mendukung/memberikan solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit kerja terkait lainnya.

g). Melakukan pengukuran, analisa risiko kredit, pemantauan dan pengendalian, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.

h). Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional dan atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO).

i). Meningkatkan kompetensi pengurus dan pejabat Bank dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko.

## **13. Divisi Hukum & Corporate Secretary**

a). Bertanggungjawab terhadap tuntutan hukum yang dihadapi oleh Bank, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

b). Bertanggungjawab dalam hal membuat perjanjian/perikatan antara Bank dengan pihak ketiga dan kegiatan dibidang hukum lainnya.

- c). Memberikan bantuan advis/saran hukum menyangkut permasalahan hukum yang terjadi di Bank.
- d). Melaksanakan fungsi Corporate Secretary dan Humas sebagai single contact poin hubungan antara Bank dengan berbagai stakeholder, termasuk media.
- e). Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Stakeholder lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
- f). Memberikan informasi secara aktual terhadap issue yang berkembang baik yang bersifat positif maupun negatif kepada stakeholders.

#### **14. Divisi Perencanaan Strategis**

- a). Melakukan analisa terhadap perkembangan kondisi makro dan mikro ekonomi keuangan baik secara regional maupun nasional guna merencanakan strategi bisnis perusahaan kedepan.
- b). Membuat indikator perkembangan bisnis dalam rangka penyusunan anggaran KC/KCP/K Kedai dalam bentuk kebijakan umum direksi.
- c). Menyusun rencana kerja dan anggaran bank jangka panjang (corporate plan) dan menengah (business plan).
- d). Melaksanakan fungsi project management office (PMO) guna membantu Direksi dalam menjalankan program inisiatif perusahaan dan percepatan pengembangan usaha bank
- e). Membuat analisa kelayakan terhadap perluasan jaringan kantor termasuk ATM serta analisa BEP terhadap jaringan kantor yang akan dibuka

#### **15. Divisi Teknologi Informasi**

- a). Melakukan perencanaan, pengembangan dan kajian strategis fungsi TI meliputi TI infrastruktur, TI vendor, TI operasional, TI support termasuk TI system security untuk menghasilkan implementasi TI yang baik dan benar.
- b). Melaksanakan review terhadap penerapan TI blue print, TI operasional, TI business proses untuk mengembangkan, menyelaraskan dan menerapkan TI organisasi dan perencanaan, TI vendor, TI jaringan operasional, TI technical support dan help desk dan TI infrastruktur termasuk TI security strategy dan TI blue print.

- c). Menetapkan atau mengimplementasikan proses atau sistem pengembangan aplikasi atau system development life cycle (SDLC) secara end-to-end untuk memastikan setiap tahapan proses pengembangan telah sesuai dengan requirement atau request for proposal (RFP), business requirement definition (BRD) dan kebijakan pengamanan teknologi sistem informasi.
- d). Melaporkan kegiatan operasional TI yang terdiri dari data center, help desk dan disaster recovery center (DRC) sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
- e). Menjamin dan mengelola tersedianya dukungan dan layanan TI atau TI service dan delivery terhadap kebutuhan bisnis Bank Riau.

#### **2.3.4 Peraturan Bank Indonesia Mengenai Pengelolaan TI Perbankan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/Pbi/2007 Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum adalah sebagai berikut:

##### **Pasal 1**

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 10 tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Teknologi informasi adalah teknologi terkait sarana computer, telekomunikasi dan sarana elektronik lainnya yang digunakan dalam pengolahan data keuangan dan atau pelayanan jasa perbankan.
3. Layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut electronic banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, Phone Banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.
4. Rencana Strategis Teknologi informasi (*Information Technology Strategic Plan*) adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi teknologi informasi bank, strategi yang mendukung visi misi tersebut dan prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan dalam penggunaan teknologi informasi

untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung rencana strategis jangka panjang.

5. Pusat Data (*Data Center*) adalah fasilitas utama pemrosesan data bank yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional bank secara berkesinambungan.
6. *Database* adalah sekumpulan data yang komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing-masing dan dikelola oleh *database administrator*.
7. *Disaster Recovery Center* (DRC) adalah fasilitas pengganti pada saat pusat data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang computer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada computer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pusat data bank untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha (*business continuity*).
8. *Business Continuity Plan* (BCP) adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan resiko, penanganan dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional bank dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan.
9. Pemrosesan transaksi berbasis teknologi adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.
10. Komisaris :
  - a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

- c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi kantor cabang bank asing adalah pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan.

11. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.

## **Ruang Lingkup Manajemen Risiko Teknologi Informasi**

### **Pasal 2**

(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

- a) pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b) kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
- c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
- d) sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.

(3) Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.

### **Pasal 3**

Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

## **Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi**

### **Bagian Pertama**

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

### **Pasal 4**

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi.

### **Pasal 5**

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a) mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

### **Pasal 6**

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Direksi paling kurang mencakup:

a. menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi;

b. memastikan bahwa :

1. Teknologi Informasi yang digunakan Bank dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis Bank dan kelangsungan pelayanan kepada nasabah;

2. Terdapat upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
3. Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif
4. Tersedianya kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang memadai dan dikomunikasikan serta diterapkan secara efektif baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;
5. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi yang paling kurang dapat:
  - a) mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi;
  - b) mendukung penyelesaian proyek;
  - c) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur;
  - d) meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan dari Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna.

#### **Pasal 7**

(1) Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committe).

(2) Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan:

- a) Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- b) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- c) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter);

- d) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- e) Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
- f) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya dalam peningkatannya;
- g) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

(3) Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan:

- a) direktur yang membawahi satuan kerja Teknologi Informasi;
- b) direktur yang membawahi satuan kerja Manajemen Risiko;
- c) pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
- d) pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja pengguna utama Teknologi Informasi.

## **Bagian Kedua**

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Penggunaan Teknologi Informasi di Bank  
Pasal 8

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(2) Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi paling kurang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Manajemen;
- b) Pengembangan dan pengadaan;
- c) Operasional Teknologi Informasi;
- d) Jaringan komunikasi;
- e) Pengamanan informasi;
- f) Business Continuity Plan;



- g) End user computing;
- h) Electronic Banking; dan
- i) Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

(3) Bank wajib menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk dapat memastikan aspek-aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berjalan dengan optimal.

#### **Pasal 9**

(1) Bank wajib memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang mendukung rencana strategis kegiatan usaha Bank.

(2) Rencana Strategis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.

#### **Bagian Ketiga**

Proses Manajemen Risiko Terkait Teknologi Informasi

#### **Pasal 10**

(1) Bank wajib melakukan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi.

(2) Proses manajemen risiko dilakukan terhadap aspek-aspek terkait Teknologi Informasi yang paling kurang mencakup pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, operasional Teknologi Informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, Business Continuity Plan, end user computing, Electronic Banking, dan penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

(3) Dalam hal Bank menggunakan jasa pihak lain untuk menyelenggarakan Teknologi Informasi, Bank wajib memastikan bahwa pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan juga manajemen risiko yang paling kurang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

#### **Pasal 11**

Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi Bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan

data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Bank, antara lain mencakup

- a) menetapkan dan menerapkan prosedur dan metodologi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi secara konsisten;
- b) menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem;
- c) melakukan testing yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan suatu sistem, termasuk uji coba bersama satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian satu sistem dengan sistem yang lain;
- d) melakukan dokumentasi sistem yang dikembangkan dan pemeliharaannya;
- e) memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi.

#### **Pasal 12**

(1) Bank wajib mengidentifikasi dan memantau serta mengendalikan risiko yang terdapat pada aktivitas operasional Teknologi Informasi, pada jaringan komunikasi serta pada end user computing untuk memastikan efektifitas, efisiensi dan keamanan aktivitas tersebut antara lain dengan :

- a) menerapkan pengendalian fisik dan lingkungan terhadap fasilitas Pusat Data (*Data Center*) dan *Disaster Recovery Center*;
- b) menerapkan pengendalian hak akses secara memadai sesuai kewenangan yang ditetapkan;
- c) menerapkan pengendalian pada saat input, proses, dan output dari informasi;
- d) memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari ketergantungan Bank terhadap penggunaan jaringan komunikasi;
- e) memastikan aspek desain dan pengoperasian dalam implementasi jaringan komunikasi sesuai dengan kebutuhan;
- f) melakukan pemantauan kegiatan operasional Teknologi Informasi termasuk adanya audit trail;
- g) melakukan pemantauan penggunaan aplikasi yang dikembangkan atau diadakan oleh satuan kerja di luar satuan kerja Teknologi Informasi.

(2) Bagi Bank yang memiliki unit usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut, pihak bank wajib memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan yang terpisah bagi kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah.

### **Pasal 13**

(1) Bank wajib memastikan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* dapat dilaksanakan secara efektif agar kegiatan usaha bank tetap berjalan saat terjadi gangguan yang signifikan pada sarana Teknologi Informasi yang digunakan Bank.

(2) Bank wajib melakukan uji coba atas *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* terhadap seluruh sistem/aplikasi dan infrastruktur yang kritikal sesuai hasil *Business Impact Analysis*, paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan end user (end to end).

(3) Bank wajib melakukan pengkinian *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*.

### **Pasal 14**

Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a) pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaannya (*availability*) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b) pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi;
- c) pengamanan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses, pengamanan operasional, dan aspek penggunaan Teknologi Informasi lainnya;
- d) adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi; dan
- e) pengamanan informasi diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (risk assessment) pada informasi yang dimiliki Bank.

## **2.4 Perencanaan Strategi Teknologi Informasi**

### **2.4.1 Pengertian Teknologi Informasi**

Teknologi informasi meliputi konsep-konsep utama, pengembangan, dan berbagai isu manajemen teknologi informasi yaitu hardware, software, jaringan, manajemen data dan banyak teknologi berbasis internet (O'Brien, 2005).

Menurut Whitten (2004) *information technology is a contemporary term that describes the combination of computer technology (hardware and software) with the telecommunications technology (data, image, and voice networks)*. Teknologi informasi adalah sebuah istilah yang menjelaskan kombinasi dari teknologi komputer (*hardware* dan *software*) dengan teknologi telekomunikasi (data, gambar, dan jaringan suara). Teknologi informasi adalah kumpulan sumber daya informasi perusahaan, para penggunanya, serta manajemen yang menjalankannya; meliputi infrastruktur teknologi informasi dan semua sistem informasi lainnya dalam perusahaan.

Infrastruktur teknologi informasi meliputi proses integrasi, operasi, dokumentasi, pemeliharaan, dan manajemennya (Rainer, Turban, 2006). Menurut William Sawyer (2005), *information technology is a general term that describes any technology that helps to produce, manipulate, store, communicate, and/or disseminate information*. Definisi tersebut dapat diartikan sebagai teknologi informasi adalah istilah yang umum untuk mendeskripsikan teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menggabungkan komputer dengan komunikasi yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan data, suara, dan video.

Menurut Thompson dan Cat-Baril (2003), teknologi informasi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dikemas sebagai suatu alat untuk menangkap, menyimpan, memproses, dan menghasilkan digital. Adapun pengertian teknologi informasi menurut Alter (1999) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh sistem informasi. Perangkat keras adalah sekumpulan perangkat fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi, seperti komputer, *workstation*, peralatan jaringan, tempat menyimpan data (*data storage*),

dan peralatan transmisi (*transmission devices*). Perangkat lunak adalah program komputer yang menginterpretasikan masukan (*input*) oleh user dan memberitahukan kepada komputer tentang apa yang harus dilakukan. Menurut Remenyi (1995), teknologi informasi adalah suatu keuntungan atau kebalikan yang diperoleh dengan teknologi informasi terhadap suatu perusahaan yang bersedia membayar atas penggunaan teknologi informasi tersebut.

Manfaat teknologi informasi menurut Bill Bysinger (1996) teknologi dapat menciptakan keuntungan strategis untuk sebuah organisasi dalam kemajuan pada beberapa daerah dan kemampuannya, contohnya :

- a. Pelayanan terhadap pelanggan
- b. Kemampuan untuk mempercepat kemajuan
- c. Menyesuaikan produk dan pelayanan
- d. Mendapatkan pesan untuk *stakeholder*
- e. Biaya operasi dan biaya tambahan

Menurut Anita Cassidy (1998), teknologi informasi dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan karena Teknologi Informasi dapat digunakan untuk menangkap nilai dari saingan organisasi mereka. Hal ini dimaksudkan bahwa Teknologi Informasi akan berdampak pada :

- a. Hubungan dengan pelanggan yang kuat
- b. Pembagian pasar dengan para pesaing
- c. Pengeluaran dari pemasok
- d. Pembayaran karyawan
- e. Pajak dan peraturan pemerintah
- f. Jumlah dari diinvestasikannya modal

Dari penjelasan mengenai manfaat teknologi informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat teknologi informasi meliputi :

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggan
- b. Mengurangi biaya operasi dan tambahan
- c. Dapat mengimbangi persaingan dengan perusahaan lain dengan usaha sejenis
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja para karyawan

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem informasi yang dapat membantu mengelola, menghasilkan, memamipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi serta merupakan komponen-komponen seperti *hardware*, *software* serta jaringan yang merupakan bagian dari sistem informasi (SI).

Menurut Ward dan Peppard (2002), teknologi informasi menunjuk pada spesifikasi mengenai teknologi, khususnya hardware, software dan jaringan komunikasi.

Menurut Thomson dan Cats-Baril (2003), teknologi informasi adalah perangkat keras dan piranti lunak yang dikemas sebagai sebuah alat untuk menangkap, menyimpan, memproses dan menghasilkan digital.

#### **2.4.2 Strategi Teknologi Informasi**

Menurut Ward dan Peppard (2002), strategi teknologi informasi adalah strategi yang berfokus pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah informasi.

#### **2.5 Perlunya Strategi dan Teknologi Informasi**

*Ward dan Peppard* (2002) menyatakan beberapa alasan yang menyebabkan perlunya bagi suatu perusahaan untuk memiliki suatu strategi sistem informasi atau teknologi informasi :

- a. Invesati pada TI tidak mendukung sasaran bisnis
- b. Tidak terkontrolnya TI yang ada
- c. Sistem yang tidak terintegrasi sehingga memungkinkan terjadinya data yang hilang
- d. Perusahaan tidak memiliki panduan untuk menentukan prioritas proyek TI dan selalu terjadi perubahan pada TI sehingga menurunkan produktivitas
- e. Manajemen informasi yang kurang akurat
- f. Strategi TI yang tidak sejalan dengan strategi bisnis perusahaan

- g. Proyek TI hanya dievaluasi pada basis keuangan semata sehingga dianggap sebagai investasi yang berlebihan.

Strategi TI hendaknya dapat mengarahkan kinerja sistem secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan masukan untuk pengambilan keputusan manajemen.

## **2.6 Manfaat Perencanaan TI**

Menurut Anita Cassidy (2006), meskipun alasan mendorong pengembangan rencana strategis TI dapat berbeda, ada kesamaan dalam manfaat dari rencana. Terdapat nilai lebih dan manfaat dalam fungsi perencanaan strategis dibandingkan dengan tanggung jawab TI lainnya. Beberapa manfaat rencana strategis TI menurut Anita Cassidy meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan efektif dari suatu aset yang mahal dan kritis terhadap organisasi.
- b. Meningkatkan komunikasi dan hubungan antara bisnis dan organisasi TI
- c. Menyelaraskan arah dan prioritas TI ke arah bisnis dan prioritas
- d. Mengidentifikasi peluang dengan menggunakan teknologi untuk sebuah kompetitif keuntungan dan meningkatkan nilai bisnis
- e. Perencanaan arus informasi dan proses
- f. Pengalokasian sumber daya TI secara efisien dan efektif
- g. Mengurangi upaya dan dana yang diperlukan sepanjang siklus hidup sistem

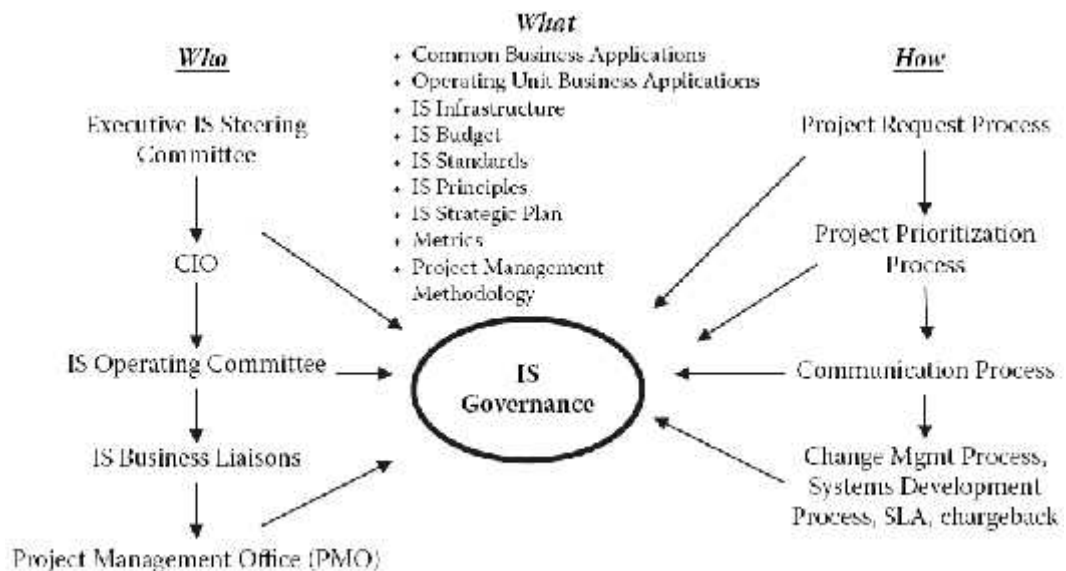
## **2.7 Tata Kelola Teknologi Informasi**

### **2.7.1 Pengertian Tata Kelola**

Menurut Anita Cassidy (2006), tata kelola adalah suatu kerangka dasar yang harus ada untuk perencanaan strategis teknologi informasi (TI) dan proses perencanaan strategis menjadi sukses. Tata kelola menyediakan pengambilan keputusan dan akuntabilitas kerangka kerja untuk manajemen yang efektif dari TI. Mungkin ada banyak komponen untuk tata kelola TI, namun

tujuan dasar dari tata kelola adalah untuk mengidentifikasi apa keputusan akan dibuat, dan oleh siapa, dan untuk menentukan bagaimana kegiatan akan dipantau terhadap rencana tersebut. Rencana strategis TI merupakan komponen yang sangat penting untuk tata kelola yang efektif. Sebaliknya, rencana strategi TI yang baik akan mencantumkan proses dokumentasi yang jelas untuk tata kelola TI. Tata kelola menjamin bahwa TI memberikan nilai bagi bisnis dan resiko yang dikelola secara memadai.

Keputusan dapat mencakup bidang-bidang seperti anggaran keseluruhan dana lokasi sumber daya, infrastruktur, aplikasi bisnis, standar, kebijakan, dan prioritas, prinsip panduan TI dan rencana strategis TI. Yang paling sering dalam pengambilan keputusan adalah tentang waktu (jadwal), uang (anggaran), tingkat staf dan alokasi. Namun, keputusan lain juga membutuhkan tata kelola, seperti standar, kebijakan dan perilaku yang diinginkan. Salah satu contoh dari keputusan ini adalah menetapkan kerangka kerja untuk ketika sebuah perusahaan harus menggunakan paket perangkat lunak dan ketika perangkat lunak kustom akan sesuai. Intinya adalah bahwa tata kelola menjelaskan proses melalui manakah sebuah perusahaan membuat keputusan.



**Gambar 2.2 Tata kelola TI**



### **2.7.2 Pendekatan terhadap Tata Kelola**

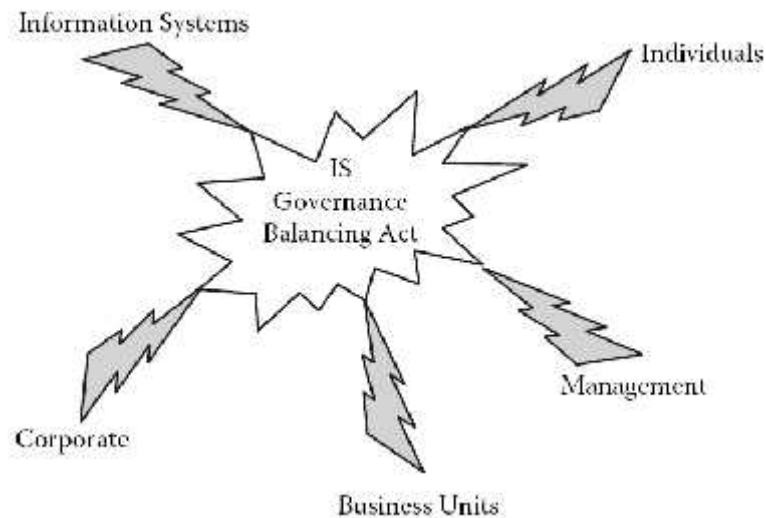
Beberapa kasus yang sering terjadi dalam pendekatan tata kelola tanpa desain yang disengaja :

- a) Diktator TI : Dalam lingkungan yang otokratis, departemen TI membuat semua keputusan dan membuat kontrol ketat atas alat dan asset TI. Dalam lingkungan ini, CIO dan organisasi TI sering dikritik dan tidak dihormati. Bisnis ini sering tidak puas karena keputusan TI tidak mengarah.
- b) Orang-orang yang memiliki kekuasaan : Dalam lingkungan ini, individu-individu di seluruh bisnis awalnya mungkin puas karena mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi ketidakpuasan tumbuh sebagai buah dari infrastruktur tidak bekerja sama dengan baik. Lingkungan ini bisa sangat boros dan mahal, tetapi kemungkinan biaya tidak terlihat. Hal itu mungkin disembunyikan dalam anggaran departemen individu.
- c) Demokratis: Dalam lingkungan ini, semuanya bersifat voting. Hal ini dapat memakan waktu dan proses yang frustrasi. Seringkali, keputusan populer mengesampingkan keputusan terbaik. Hal ini menjadi politis sebagai lawan individu yang bersaing memperebutkan dukungan.
- d) Manajemen bisnis yang monarki : Dalam lingkungan ini, eksekutif bisnis senior membuat semua keputusan TI yang mempengaruhi seluruh korporasi. Hal ini bisa menjadi baik atau buruk tergantung pada keahlian dan pengetahuan manajemen.
- e) Unit tenaga perusahaan : Adalah umum di sebuah perusahaan besar dengan unik divisi untuk memiliki lebih banyak kekuatan di unit bisnis dari pada terpusat. Meskipun metode feodal ini bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan unit bisnis, sulit untuk meningkatkan upaya strategis perusahaan yang luas di seluruh unit bisnis. Hal ini juga mungkin lebih mahal karena unit usaha tidak dapat menggunakan standar dan sistem-sistem umum di seluruh unit bisnis.
- f) Kekuasaan perusahaan : Dalam lingkungan yang sangat terpusat, pusat badan perusahaan sering membuat keputusan. Meskipun hal ini mungkin memiliki beberapa efisiensi karena sinergi yang dapat dimanfaatkan, hal ini sering

berakibat tidak puasnya unit usaha yang belum merasa mampu mengendalikan tujuan mereka.

- g) Ragu-ragu : Dalam situasi seperti ini, tak seorangpun yang membuat keputusan. Ada kekosongan dan tidak jelasnya tanggung jawab pimpinan pada pengambilan keputusan.

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2, desain tata kelola mengembangkan pengambilan keputusan struktur dan organisasi yang menyeimbangkan semua di atas kepentingan. Tidak ada satu pendekatan untuk merancang tata kelola yang bekerja untuk setiap perusahaan. Model tata kelola TI harus sesuai dengan perusahaan dan budaya manajemen, jatuh tempo dan ukuran organisasi dan strategi bisnis. Yang lebih terstruktur, organisasi yang matang mungkin memiliki proses tata kelola yang ketat, banyak didefinisikan proses dan metrik, dan TI yang sangat resmi mengarahkan pertemuan komite. Sebuah perusahaan besar dengan banyak divisi mungkin memiliki struktur dan pendekatan tata kelola yang jauh berbeda dari lingkungan perusahaan sangat terpusat. Seringkali, tata kelola TI mencerminkan kekuatan dan pengambilan keputusan struktur dalam bisnis. Dari-pada melawan kekuatan yang melekat, adalah penting untuk mengenali pengambilan keputusan bisnis dan struktur kerja di dalamnya. Tidak peduli seberapa belum matang, informal, atau kecil, fungsi TI memerlukan beberapa bentuk pemerintahan dan keterlibatan organisasi untuk menjadi sukses. Dalam setiap ukuran perusahaan, tata kelola dapat dirancang untuk membuat keputusan dengan cepat dan responsive.



**Gambar 2.3 Tata kelola penyeimbang kepentingan**

## **2.8 Framework Dalam Tata Kelola Teknologi Informasi**

### **2.8.1 Framework TOGAF**

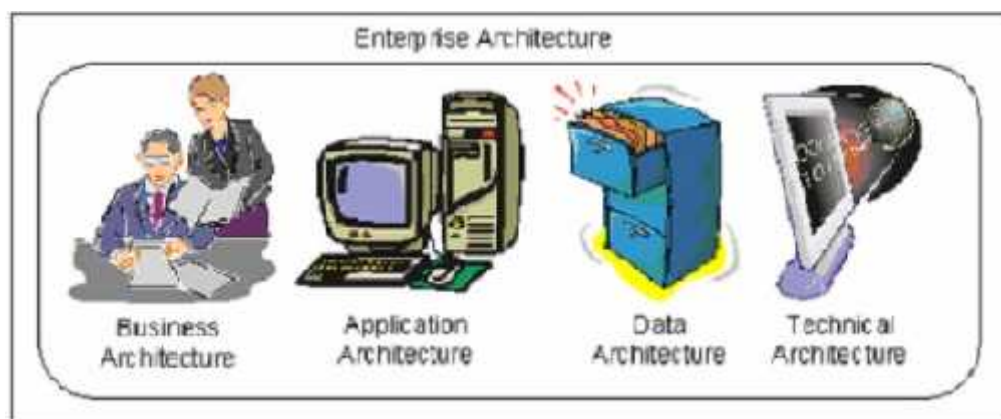
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) merupakan suatu framework untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Sesuai namanya, TOGAF pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 oleh The Open Group dengan berdasarkan pada Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM) yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

TOGAF merupakan sebuah kerangka (metoda) terperinci dan sekumpulan perangkat pendukung untuk mengembangkan sebuah arsitektur teknologi informasi perusahaan. Kerangka menyediakan sebuah klasifikasi untuk menghubungkan konsep-konsep yang menggambarkan dunia nyata pada konsep-konsep yang menggambarkan sistem informasi dan implementasinya. Kerangka digunakan untuk mengelompokkan informasi yang diperlukan dengan tujuan untuk menjelaskan keseluruhan perusahaan dan untuk menyimpan informasi tersebut, biasanya didukung oleh perangkat tempat penyimpanan yang tepat.

Framework arsitektur merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk mengembangkan jangkauan secara luas dari arsitektur yang berbeda-beda. Framework arsitektur seharusnya menguraikan suatu metode untuk merancang

sistem informasi yang berhubungan dengan sekumpulan building block dan untuk menunjukkan bagaimana building block sesuai satu sama lain. Menggunakan framework arsitektur akan mempercepat dan menyederhanakan pengembangan arsitektur, menyakinkan cakupan yang lebih lengkap dari solusi yang dirancang, dan menyakinkan bahwa arsitektur yang dipilih mengijinkan untuk pertumbuhan masa depan sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis. TOGAF memegang peranan penting membantu proses pengembangan arsitektur dan memungkinkan pengguna TI membangun solusi berbasis sistem terbuka untuk kebutuhan bisnis mereka.

Menurut The Open Group (2007), ada empat jenis arsitektur yang umumnya diterima sebagai bagian dari keseluruhan arsitektur enterprise, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Kombinasi arsitektur data dan arsitektur aplikasi disebut juga sebagai arsitektur sistem informasi. Sebenarnya TOGAF secara asli dirancang untuk mendukung arsitektur teknologi. Tetapi TOGAF semakin berkembang dan kemudian mendukung keempat jenis arsitektur tersebut.



**Gambar 2.4 Enterprise TOGAF**

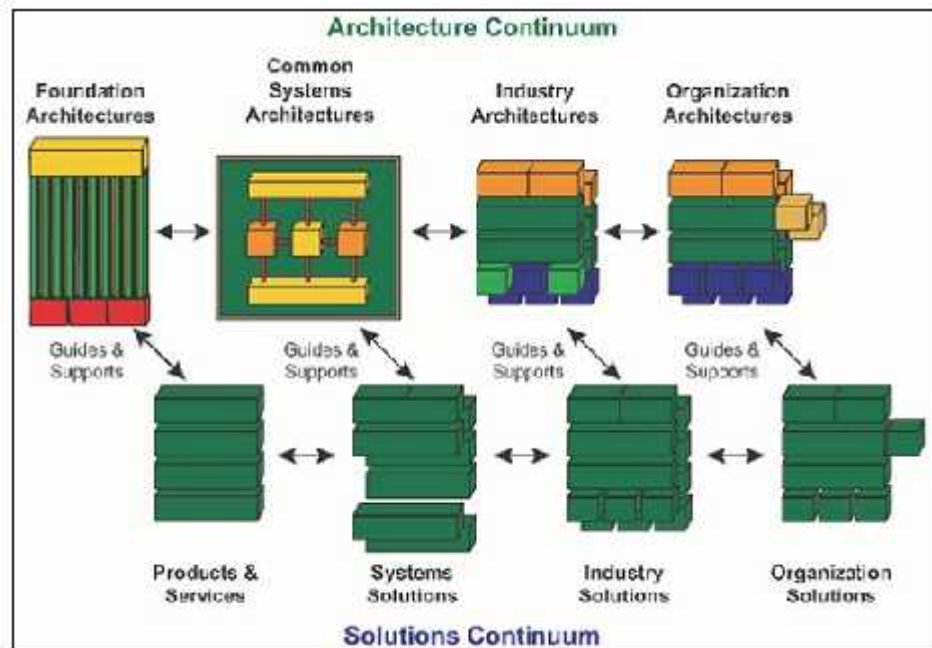
TOGAF memiliki sejumlah komponen sebagai berikut:

- a) **Architecture Development Method (ADM)** – komponen inti dari TOGAF yang menguraikan langkah-langkah dalam mengembangkan arsitektur perusahaan.



**Gambar 2.5 Komponen TOGAF**

- b) **ADM Guidelines and Techniques** – komponen ini terdiri atas kumpulan petunjuk dan teknik dalam mengaplikasikan TOGAF ADM.
- c) **Architecture Content Framework** – komponen ini mendeskripsikan content framework dari TOGAF yang terdiri atas metamodel artefak, building blocks, dan deliverables.
- d) **Enterprise Continuum and Tools** – komponen ini merupakan “tempat penyimpanan virtual” dari semua aset arsitektur meliputi model, pola, penjelasan arsitektur, dan sebagainya yang terdapat dalam perusahaan serta industri teknologi informasi secara umum. Aset tersebut diyakini perusahaan harus tersedia untuk pengembangan arsitektur. Pada fase yang relevan sepanjang TOGAF ADM, terdapat peringatan untuk mempertimbangkan aset arsitektur apa dari TOGAF Enterprise Continuum yang harus dipakai arsitek jika tersedia.



**Gambar 2.6** Arsitektur Continuum TOGAF

- e) **TOGAF Reference Models (RM)** – komponen ini memuat architectural reference models yang mencakup TOGAF Foundation Architecture dan The Integrated Information Infrastructure RM.
- f) **Architecture Capability Framework** – komponen ini memuat proses, keahlian, peran dan tanggung jawab dalam organisasi yang dibutuhkan agar arsitektur dapat berfungsi.

### 2.8.2 Framework COBIT

Control Objective for Information & Related Technology (COBIT) adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT Governance yang dapat membantu auditor, pengguna (user), dan manajemen, untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis IT (Sasongko, 2009).

COBIT mendukung tata kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keselarasan TI dengan bisnis. Selain itu, kerangka kerja juga memastikan bahwa TI memungkinkan bisnis, memaksimalkan keuntungan, resiko

TI dikelola secara tepat, dan sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab (Tanuwijaya dan Sarno, 2010).

COBIT merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara. Dimana di setiap negara dibangun chapter yang dapat mengelola para profesional tersebut.

### **2.8.2.1 Kerangka Kerja COBIT**

Kerangka kerja COBIT terdiri atas beberapa arahan/pedoman, yakni:

*a) Control Objectives*

Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat-tinggi (high-level control objectives) yang terbagi dalam 4 domain, yaitu : Planning & Organization , Acquisition & Implementation , Delivery & Support , dan Monitoring & Evaluation.

*b) Audit Guidelines*

Berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci (detailed control objectives) untuk membantu para auditor dalam memberikan management assurance dan/atau saran perbaikan.

*c) Management Guidelines*

Berisi arahan, baik secara umum maupun spesifik, mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Sejauh mana TI harus bergerak atau digunakan, dan apakah biaya TI yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkannya.
2. Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus.
3. Apa saja faktor atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencapai sukses ( critical success factors ).
4. Apa saja risiko-risiko yang timbul, apabila kita tidak mencapai sasaran yang ditentukan.
5. Bagaimana dengan perusahaan lainnya, apa yang mereka lakukan.

6. Bagaimana mengukur keberhasilan dan bagaimana pula membandingkannya.

COBIT dikeluarkan oleh IT Governance Institute (ITGI). COBIT digunakan untuk menjalankan penentuan atas IT dan meningkatkan pengendalian IT. COBIT juga berisi tujuan pengendalian, petunjuk audit, kinerja dan hasil metrik, faktor kesuksesan dan maturity model.

Lingkup kriteria informasi yang sering menjadi perhatian dalam COBIT adalah:

A. Effectiveness

Menitikberatkan pada sejauh mana efektifitas informasi dikelola dari data-data yang diproses oleh sistem informasi yang dibangun.

B. Efficiency

Menitikberatkan pada sejauh mana efisiensi investasi terhadap informasi yang diproses oleh sistem.

C. Confidentiality

Menitikberatkan pada pengelolaan kerahasiaan informasi secara hierarkis.

D. Integrity

Menitikberatkan pada integritas data/informasi dalam sistem.

E. Availability

Menitikberatkan pada ketersediaan data/informasi dalam sistem informasi.

F. Compliance

Menitikberatkan pada kesesuaian data/informasi dalam sistem informasi.

G. Reliability

Menitikberatkan pada kemampuan/ketangguhan sistem informasi dalam pengelolaan data/informasi.

Sedangkan fokus terhadap pengelolaan sumber daya teknologi informasi dalam COBIT adalah pada :

1. Applications
2. Information
3. Infrastructure
4. People



Dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, COBIT memiliki karakteristik :

- a. Business-focused
- b. Process-oriented
- c. Controls-based
- d. Measurement-driven

COBIT mengelompokkan semua aktivitas bisnis yang terjadi dalam organisasi menjadi 34 proses yang terbagi ke dalam 4 buah domain proses, meliputi :

a. Planning & Organization.

Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyesuaian strategi TI dengan strategi perusahaan, mencakup masalah strategi, taktik dan identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula.

Domain ini mencakup :

1. PO1 – Menentukan rencana strategis
2. PO2 – Menentukan arsitektur informasi
3. PO3 – Menentukan arah teknologi
4. PO4 – Menentukan proses TI, organisasi dan hubungannya
5. PO5 – Mengelola investasi TI
6. PO6 – Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen
7. PO7 – Mengelola sumber daya manusia
8. PO8 – Mengelola kualitas
9. PO9 – Menilai dan mengelola resiko TI
10. PO10 – Mengelola proyek

b. Acquisition & Implementation.

Domain ini berkaitan dengan implementasi solusi IT dan integrasinya dalam proses bisnis organisasi untuk mewujudkan strategi TI, juga meliputi perubahan dan maintenance yang dibutuhkan sistem yang sedang berjalan untuk memastikan daur hidup sistem tersebut tetap terjaga.

Domain ini meliputi:

1. AI1 – Mengidentifikasi solusi yang dapat diotomatisasi.
2. AI2 – Mendapatkan dan maintenance software aplikasi.
3. AI3 – Mendapatkan dan maintenance infrastuktur teknologi
4. AI4 – Mengaktifkan operasi dan penggunaan
5. AI5 – Pengadaan sumber daya IT.
6. AI6 – Mengelola perubahan
7. AI7 – Instalasi dan akreditasi solusi dan perubahan.

c. Delivery & Support.

Domain ini mencakup proses pemenuhan layanan IT, keamanan sistem, kontinyuitas layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan pemenuhan proses data yang sedang berjalan.

Domain ini meliputi :

1. DS1 – Menentukan dan mengelola tingkat layanan.
2. DS2 – Mengelola layanan dari pihak ketiga
3. DS3 – Mengelola performa dan kapasitas.
4. DS4 – Menjamin layanan yang berkelanjutan
5. DS5 – Menjamin keamanan sistem.
6. DS6 – Mengidentifikasi dan mengalokasikan dana.
7. DS7 – Mendidik dan melatih pengguna
8. DS8 – Mengelola service desk dan insiden.
9. DS9 – Mengelola konfigurasi
10. DS10 – Mengelola permasalahan.
11. DS11 – Mengelola data
12. DS12 – Mengelola lingkungan fisik
13. DS13 – Mengelola operasi.

d. Monitoring and Evaluation.

Domain ini berfokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan intern dan ekstern dan jaminan independent dari proses pemeriksaan yang dilakukan.

Domain ini meliputi:

1. ME1 – Mengawasi dan mengevaluasi performansi TI.
2. ME2 – Mengevaluasi dan mengawasi kontrol internal
3. ME3 – Menjamin kesesuaian dengan kebutuhan eksternal.
4. ME4 – Menyediakan IT Governance.

e. COBIT Maturity Model

COBIT menyediakan parameter untuk penilaian setinggi dan sebaik apa pengelolaan IT pada suatu organisasi dengan menggunakan maturity models yang bisa digunakan untuk penilaian kesadaran pengelolaan (management awareness) dan tingkat kematangan (maturity level). COBIT mempunyai model kematangan (maturity models) untuk mengontrol proses-proses IT dengan menggunakan metode penilaian (scoring) sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses IT yang dimilikinya dari skala nonexistent sampai dengan optimised (dari 0 sampai 5), yaitu: 0: Non Existen, 1: Initial, 2: Repetable, 3: Defined, 4: Managed dan 5: Optimized (Purwanto dan Saufiah, 2010; Setiawan, 2008; Nurlina dan Cory, 2008).

### **2.8.2.2 Manfaat dan Pengguna COBIT**

Secara manajerial target pengguna COBIT dan manfaatnya adalah :

a) Direktur dan Eksekutif

Untuk memastikan manajemen mengikuti dan mengimplementasikan strategi searah dan sejalan dengan TI.

b) Manajemen

Untuk mengambil keputusan investasi TI.

Untuk keseimbangan resiko dan kontrol investasi.

Untuk benchmark lingkungan TI sekarang dan masa depan.

c) Pengguna

Untuk memperoleh jaminan keamanan dan control produk dan jasa yang dibutuhkan secara internal maupun eksternal.

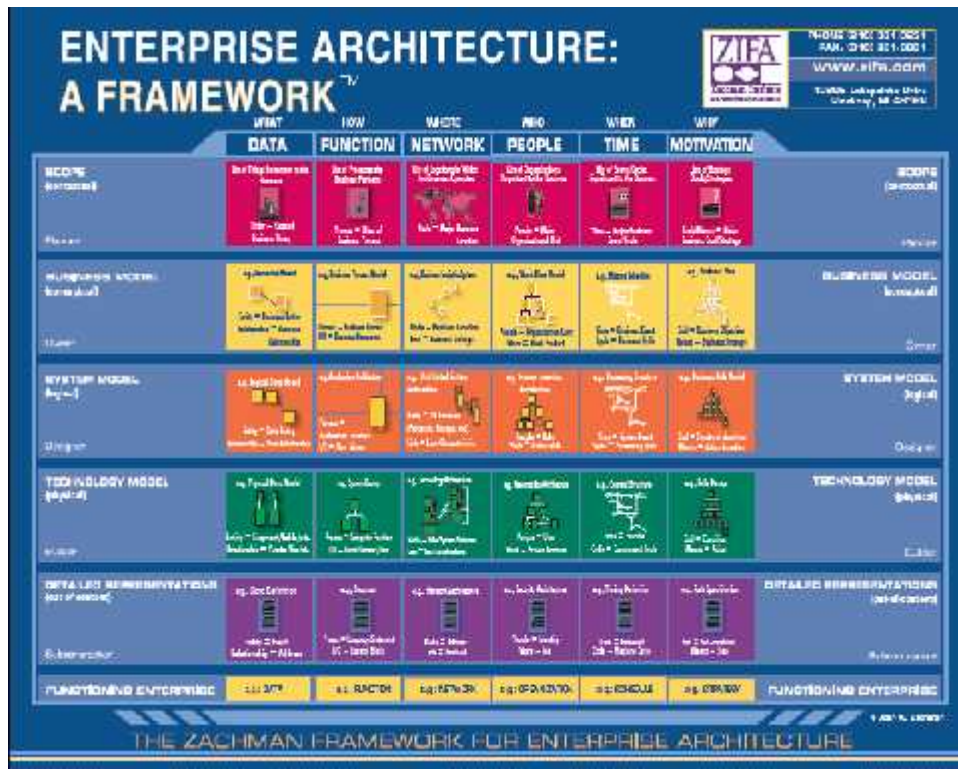
d) Auditors

Untuk memperkuat opini untuk manajemen dalam control internal.

Untuk memberikan saran pada control minimum yang diperlukan.

### 2.8.3 Framework Zachman

Framework Zachman merupakan framework arsitektural yang paling banyak dikenal dan diadaptasi. Para arsitek data enterprise mulai menerima dan menggunakan framework ini sejak Zachman pertama kali mempublikasikan artikel deskripsi kerangka kerja di IBM System Journal pada tahun 1987.



Gambar 2.7 Zachman Framework Detail

Zachman Framework merupakan matrik 6x6 yang merepresentasikan interseksi dari dua skema klasifikasi-arsitektur sistem dua dimensi. Pada dimensi pertama, Zachman menggambarkannya sebagai baris yang terdiri dari 6 perspektif yaitu :

1. The Planner Perspective (Scope Context) : Daftar lingkup penjelasan unsur bisnis yang dikenali oleh para ahli strategi sebagai ahli teori.
2. The Owner Perspective (Business Concept) : Model semantik keterhubungan bisnis antara komponen-komponen bisnis yang didefinisikan oleh pimpinan eksekutif sebagai pemilik.

3. The Designer Perspective (System Logic) : Model logika yang lebih rinci yang berisi kebutuhan dan desain batasan sistem yang direpresentasikan oleh para arsitek sebagai desainer.
4. The Builder Perspective (Technology Physics) : Model fisik yang mengoptimalkan desain untuk kebutuhan spesifik dalam batasan teknologi spesifik, orang, biaya dan lingkup waktu yang dispesifikasikan oleh engineer sebagai builder.
5. The Implementer Perspective (Component Assemblies) : Teknologi khusus, tentang bagaimana komponen dirakit dan dioperasikan, dikonfigurasi oleh teknisi sebagai implementator.
6. The Participant Perspective (Operation Classes) : Kejadian-kejadian sistem berfungsi nyata yang digunakan oleh para teknisi sebagai participant.

Untuk dimensi kedua, setiap isu perspektif membutuhkan cara yang berbeda untuk menjawab pertanyaan fundamental : who, what, why, when, where and how. Setiap pertanyaan membutuhkan jawaban dalam format yang berbeda. Zachman menggambarkan setiap pertanyaan fundamental dalam bentuk kolom/fokus.

1. What (kolom data) : material yang digunakan untuk membangun sistem (inventory set).
2. How (kolom fungsi) : melaksanakan aktivitas (process transformations).
3. Where (kolom jaringan) : lokasi, tofografi dan teknologi (network nodes).
4. Who (kolom orang) : aturan dan organisasi (organization group).
5. When (kolom waktu) : kejadian, siklus, jadwal (time periods).
6. Why (kolom tujuan) : tujuan, motivasi dan inisiatif (motivation reason).

Untuk setiap cell pada matrik yang merupakan persimpangan antara prespektif dan fokus haruslah khas dan unik. Karena setiap cell menggambarkan setiap target tertentu. Berikut ini penjelasannya:

### **Contextual**

(Why) Goal List – tujuan utama organisasi

(How) Process List – daftar semua proses yang diketahui

(What) Material List – daftar semua entitas organisasi yang diketahui

(Who) Organizational Unit & Role List – daftar dari semua unit organisasi, sub unit, dan pengidentifikasian pengguna

(Where) Geographical Locations List – lokasi sangat penting untuk organisasi, bias menjadi besar dan kecil

(When) Event List – daftar trigger dan cycle penting untuk organisasi

### **Conceptual**

(Why) Goal Relationship Model – mengidentifikasi tingkatan dari tujuan yang mendukung tujuan utama

(How) Process Model – menyediakan deskripsi proses, proses input, proses output

(What) Entity Relationship Model – mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengelolaan material dan hubungannya

(Who) Organizational Unit & Role Relationship Model – mengidentifikasi peran perusahaan dan unit dan hubungan antara keduanya

(Where) Locations Model – mengidentifikasi lokasi perusahaan dan hubungan antar keduanya

(When) Event Model – mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian dan siklus yang berhubungan dengan waktu

### **Logical**

(Why) Rules Diagram – mengidentifikasi dan mendeskripsikan aturan-aturan yg menerapkan batasan – batasan pemrosesan dan entitas-entitas tanpa memperhatikan implementasi fisik atau teknis

(How) Process Diagram – mengidentifikasi dan mendeskripsikan transisi proses dinyatakan sebagai ungkapan kata kerja tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis

(What) Data Model Diagram – mengidentifikasi dan mendeskripsikan entitas dan hubungannya tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis

(Who) Role Relationship Diagram – mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran-peran dan hubungannya ke peran yg lain sesuai tipe-tipe deliverable tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis

(Where) Locations Diagram – mengidentifikasi dan mendeskripsikan lokasi yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi dan transfer entitas dan pemrosesan tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis

(When) Event Diagram – mengidentifikasi dan mendeskripsikan keadaan yang berhubungan dgn kejadian yg lain pada sequence , siklus kemunculan dengan dan antara even – even, tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis

### **Physical**

(Why) Rules Specification – diekspresikan dalam bahasa formal; terdiri dari aturan nama dan logika terstruktur untuk menentukan dan menguji keadaan aturan

(How) Process Function Specification – diekspresikan dalam bahasa teknologi tertentu, elemen-elemen proses hirarkis berhubungan dengan pemanggilan proses

(What) Data Entity Specification – diekspresikan dalam format teknologi khusus, setiap entity didefinisikan dengan nama, deskripsi, dan atribut; menampilkan hubungan

(Who) Role Specification – mengekspresikan peran- peran dalam melakukan kerja dan komponen alur kerja pada level spesifikasi kerja produk yg terperinci

(Where) Location Specification – mengekspresikan komponen – komponen infrastruktur fisik dan koneksinya

(When) Event Specification – mengekspresikan transformasi suatu keadaan - keadaan even terhadap minat ke perusahaan

#### **2.8.3.1 Aturan dalam Framework Zachman**

Rule 1 The columns have no order : Kolom yang dapat ditukar-tukar tanpa bias dikurangi atau ditambah

Rule 2 Each column has a simple generic model : Setiap kolom dapat memiliki meta model sendiri

Rule 3 The basic model of each column must be unique : Model dasar dari setiap kolom, relasi antar objek dan struktur unik. Setiap objek berhubungan saling bergantung tetapi merepresentasikan tujuan yang unik

Rule 4 Each row describes a distinct, unique perspective : Setiap baris menggambarkan pandangan suatu kelompok usaha tertentu dan unik untuk itu. All

rows are usually present in most hierarchical organization. Semua baris biasanya hadir dalam organisasi yang paling hirarkis.

Rule 5 Each cell is unique : Kombinasi dari 2,3 & 4 harus menghasilkan sel yang unik di mana setiap sel merupakan kasus tertentu. Contoh: A2 merupakan keluaran bisnis karena mereka mewakili apa yang menjadi akhirnya dibangun.

Rule 6 The composite or integration of all cell models in one row constitutes a complete model from the perspective of that row : Untuk alasan yang sama seperti untuk tidak menambahkan baris dan kolom, mengubah nama dapat mengubah struktur logis dasar Framework.

Rule 7 The logic is recursive : Logikanya adalah relasional antara dua contoh dari entitas yang sama.

Salah satu kekuatan Kerangka Zachman adalah bahwa secara eksplisit menunjukkan seperangkat pandangan yang dapat ditangani oleh arsitektur enterprise. Beberapa merasa bahwa berikut model ini benar-benar dapat mengakibatkan terlalu banyak penekanan pada dokumentasi, artefak akan diperlukan untuk setiap satu dari tiga puluh sel dalam rangka.

John Zachman jelas menyatakan dalam dokumentasi nya, presentasi, dan seminar itu, sebagai kerangka kerja, ada fleksibilitas dalam apa kedalaman dan luasnya detail sangat diperlukan untuk setiap sel matriks berdasarkan pentingnya suatu organisasi. Sebuah mobil, yang tujuan bisnis mungkin memerlukan inventarisasi dan fokus proses-driven, bisa menemukan itu bermanfaat untuk memfokuskan upaya dokumentasi mereka pada kolom Apa dan Bagaimana. Sedangkan agen perjalanan perusahaan, yang bergerak lebih peduli dengan orang-orang dan peristiwa-waktu, bisa menemukan itu bermanfaat untuk memfokuskan upaya dokumentasi mereka pada kolom Siapa dan Kapan. Namun, tidak ada lolos dari Mengapa kolom's pentingnya karena menyediakan driver bisnis untuk semua kolom lainnya.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Zachman Framework diadaptasi secara luas :

1. Relatif sederhana karena hanya memiliki dua dimensi yang mudah untuk dipahami.



2. Keduanya mengarahkan enterprise kedalam cara yang komprehensif dan mampu mengelola arsitektur untuk divisi individu maupun departemen.
3. Menggunakan bahasa non teknis yang membantu orang untuk berfikir dan dan berkomunikasi secara lebih tepat.
4. Dapat digunakan untuk mengkotakkan dan membantu memahami isu yang luas.
5. Membantu menyelesaikan masalah desain, fokus terhadap detil tanpa kehilangan jalur secara keseluruhan.
6. Membantu mengajarkan banyak topik sistem informasi yang berbeda.
7. Merupakan alat perencanaan yang sangat membantu, menyediakan cara untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
8. Merupakan alat atau metoda khusus yang independen.

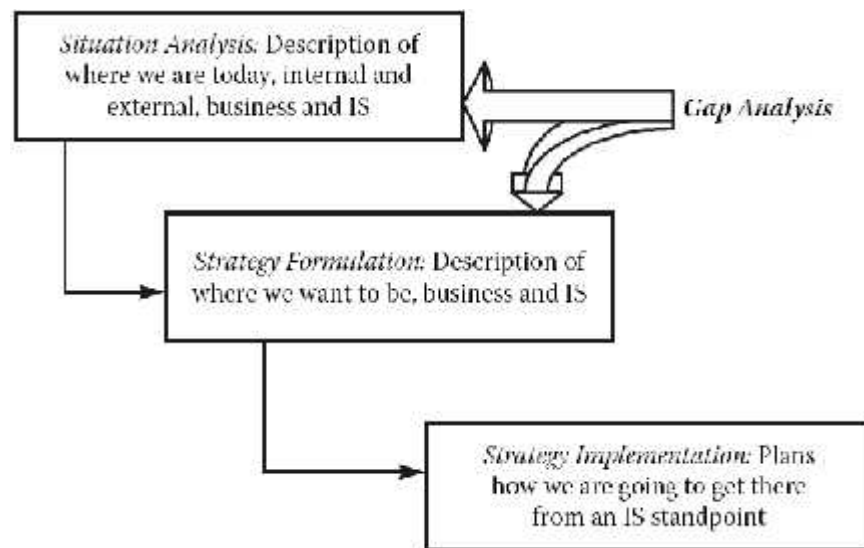
## **2.9 Proses Perencanaan Pembangunan**

### **2.9.1 Komponen Perencanaan**

Perencanaan strategis TI berbeda dengan perencanaan bisnis, akan tetapi ada beberapa konsep yang serupa. Komponen dasar dari sebuah perencanaan strategis tersebut adalah :

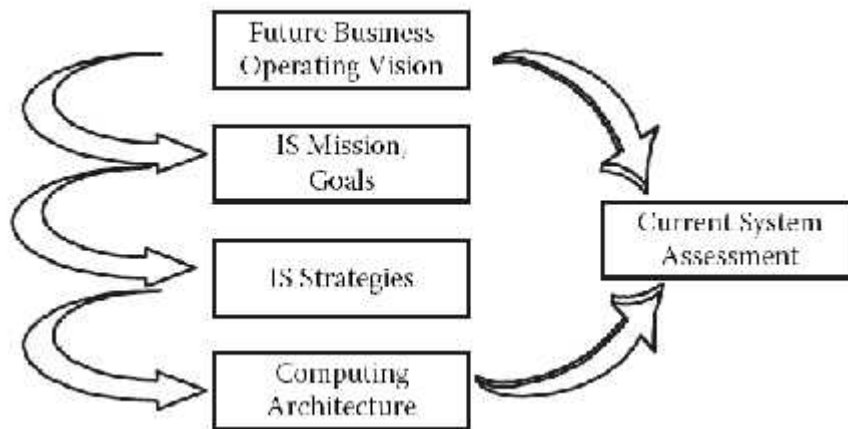
1. *Identification of where you are today*: Menilai lingkungan untuk menjawab pertanyaan, "Dimanakah kita sekarang?" Dalam rencana strategis TI, hal ini termasuk mencari secara internal maupun eksternal dari perspektif baik bisnis maupun TI. Sebuah pandangan eksternal akan menjawab pertanyaan "Apa itu mungkin?" dan "Apa praktik terbaik?" Karena bisnis harus mendorong TI, Anda harus memahami secara menyeluruh tujuan bisnis dan tantangan selain tempat TI saat ini.
2. *Identification of where you want to be in the future*: Melalui proses perencanaan, mengembangkan visi dan strategi untuk menjawab pertanyaan "Di mana yang kita inginkan?" Dalam rencana strategis TI, menjawab pertanyaan dari kedua bisnis dan perspektif TI. Masa depan arah bisnis harus menjadi penentu utama dalam menetapkan arah TI.

3. *Identification of the IS gap between where you are and where you want to be in the future:* Identifikasi kesenjangan TI antara di mana anda berada dan di mana anda ingin berada di masa depan.
4. *Identification of how to get to where you want to be in the future:* Mengembangkan rencana untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana kita sampai di sana?"



**Gambar 2.8** Komponen perencanaan

Gambar 2.7 menggambarkan komponen perencanaan. Rencana ini dimulai dengan memahami visi operasi bisnis masa depan. Visi operasi bisnis menjadi dasar untuk misi TI, tujuan, strategi, dan teknis arsitektur komputasi. Menilai sistem saat ini dengan membandingkan sistem untuk visi operasi bisnis masa depan dan TI arsitektur komputasi yang diinginkan, seperti digambarkan dalam Gambar 2.8



**Gambar 2.9** Perencanaan pengembangan

### 2.9.2 Proses Perencanaan

Dasar dari proses perencanaan strategis adalah bahwa arah bisnis dan kebutuhan bisnis mendorong arah TI dan arsitektur komputasi. Meskipun terdengar seperti sebuah konsep dasar, sungguh menakjubkan betapa banyak rencana strategis tidak memiliki arah bisnis sebagai dasar dari arah TI.

Proses perencanaan memiliki empat fase, *visioning*, *Analysis*, *Direction* dan *recommendation*.

#### Visioning Phase

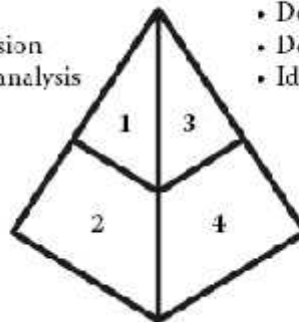
- Initiate and manage the project
- Understand business situation and vision
- Document and confirm the business analysis

#### Direction Phase

- Develop IS vision and direction
- Develop IS plan
- Identify IS projects

#### Analysis Phase

- Understand current IS situation
- Analyze current IS situation
- Develop recommendations, solution alternatives



#### Recommendation Phase

- Develop roadmap
- Develop business case
- Communicate the plan

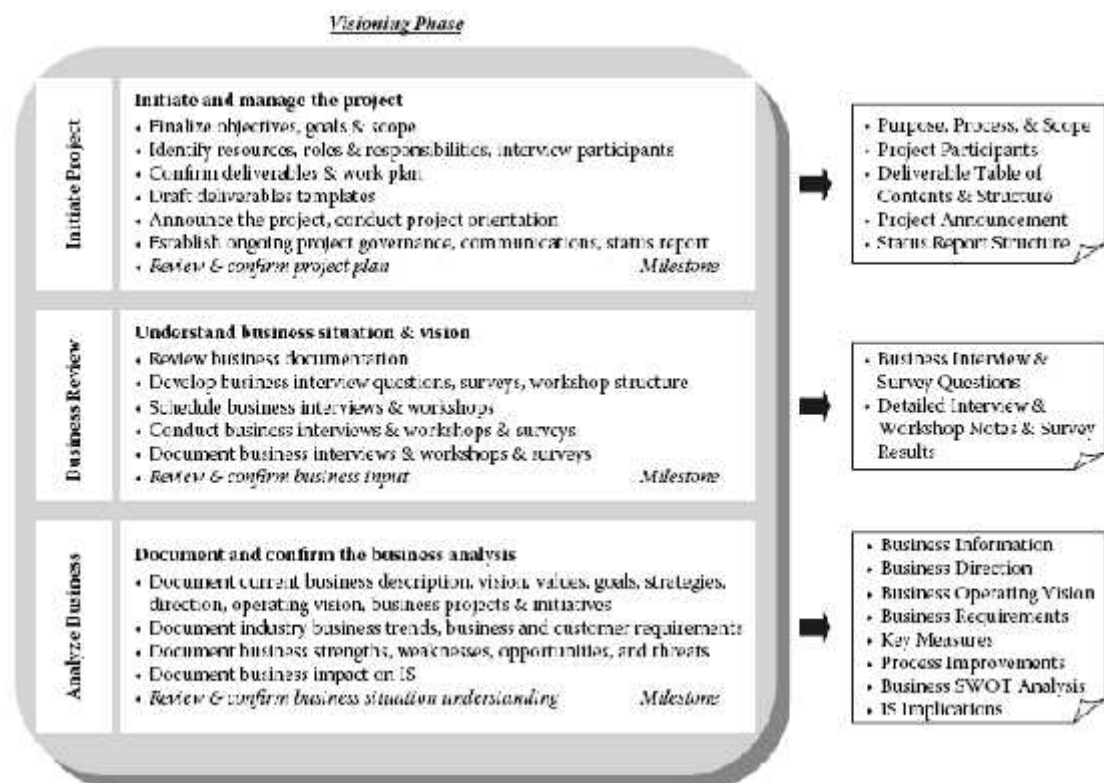
**Gambar 2.10** Fase proses perencanaan

### 2.9.3 Visioning

Pada tahap pertama *visioning*, dijelaskan mengenai visi, bagaimana membangun dan memulai proses proyek perencanaan dari organisasi. Pada

tahapan ini kita harus menginisiasi dan mengelola proyek perencanaan strategis dengan baik. Selain itu pembuat rencana strategis harus memahami visi dan situasi bisnis yang ada. Setelah didapatkan, maka analisa bisnis harus dikonfirmasi kepada organisasi dan didokumentasikan. Untuk mendapatkannya maka dapat dilakukan finalisasi dan komunikasi tujuan dari upaya perencanaan strategis dan garis besar, tentukan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh manajemen. Dalam hal ini menetapkan, atau mendefinisikan proses yang akan digunakan untuk mengembangkan rencana strategis dirancang untuk lingkungan organisasi.

Dalam fase *visioning* ini juga diidentifikasi individu yang akan terlibat dalam proses perencanaan dan menentukan peran dan tanggung jawab dari masing-masing individu tersebut. Langkah kunci dalam pengidentifikasian individu tersebut adalah untuk mewawancarai mereka yang merupakan bagian dari proses pembuatan perencanaan strategis.



**Gambar 2.11 Fase *visioning***

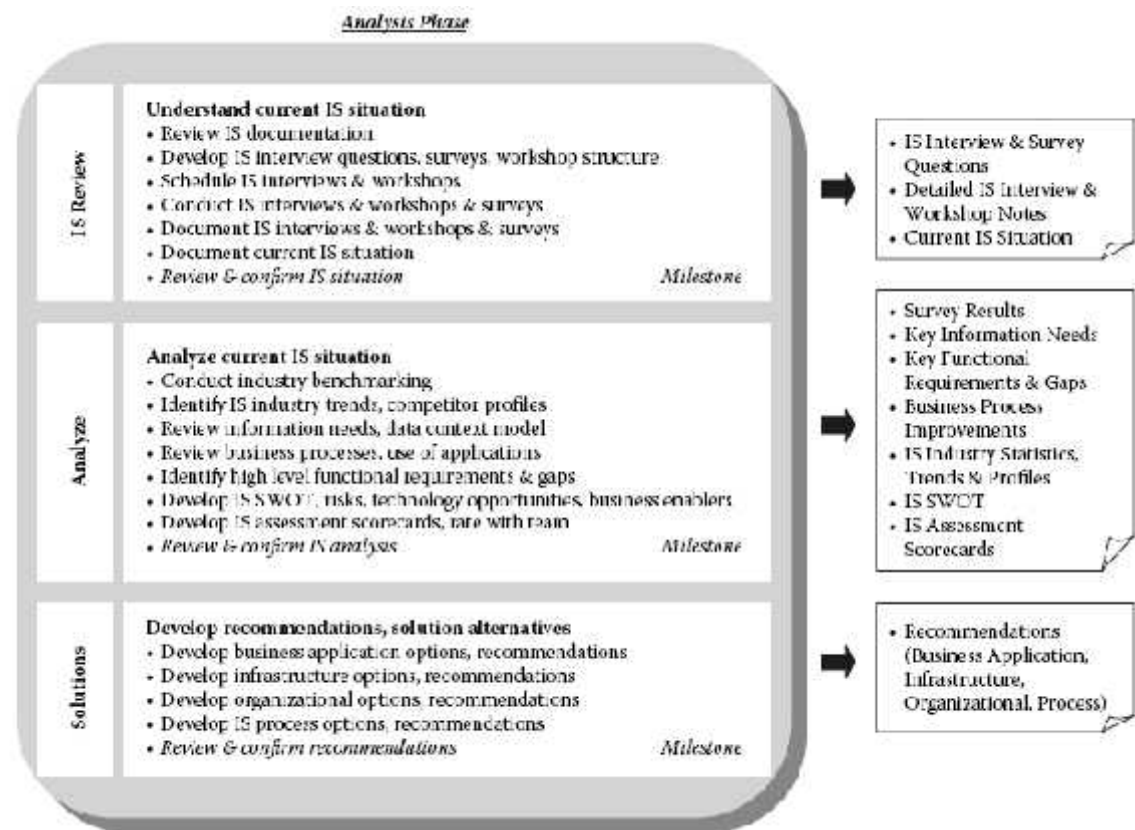
#### 2.9.4 Analysis

Analisis ini bisa didapatkan dari wawancara, *survey*, atau melalui serangkaian percakapan interaktif dan lain-lain. Pada tahap kedua yaitu analisis, dokumen dan analisa dilakukan secara obyektif terhadap lingkungan TI. Hal ini sering mendapatkan pencerahan ketika mengkomunikasikan situasi TI kepada manajemen eksekutif. Meskipun manajer tahu, bahwa TI sangat penting untuk perusahaan, mereka mungkin tidak menyadari kompleksitas dan semua berbagai komponen sampai dokumentasi disajikan.

Dokumentasikan semua aplikasi bisnis yang digunakan oleh bisnis. Fase ini dapat dilakukan dengan memulai meringkas lingkungan infrastruktur teknis, termasuk *personal computer* (PC), server, telekomunikasi dan jaringan. Review struktur organisasi, keterampilan, peran dan tanggung jawab organisasi TI. Dengan basis yang ditetapkan, memahami proses TI dan bagaimana pekerjaan selesai. Fase ini juga mencakup penelaahan terhadap pengeluaran TI, mengidentifikasi bagaimana anggaran telah berubah dan menganalisa uang mana yang dibelanjakan. Memahami beban kerja saat ini sangat penting. Identifikasi *backlog* atau semua berbagai permintaan proyek. Juga, meninjau eksternal tren TI dan mengidentifikasi bagaimana industri tren dapat mempengaruhi lingkungan dan masa depan. Bagian menarik dari proses perencanaan adalah dengan melihat pesaing dan menentukan bagaimana mereka memanfaatkan TI. Bandingkan pengeluaran TI dari industri.

Secara obyektif menentukan dan mendokumentasikan kesenjangan dimana lingkungan TI harus di masa depan dibandingkan dengan keadaannya saat ini. Dalam fase ini penting untuk berpikir kreatif. Jangan terjebak ke dalam perangkap dari "Kami selalu melakukannya dengan cara ini." Menganalisis lingkungan relatif TI dengan kebutuhan bisnis diidentifikasi dalam tahap pertama. Secara obyektif, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman situasi saat ini dalam bidang aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, organisasi dan proses. Memahami bagaimana ancaman bisnis dan peluang menonjolkan kekuatan dan kelemahan sistem. Mengidentifikasi kunci informasi persyaratan dan kebutuhan bisnis. Menggunakan daftar persyaratan, mengidentifikasi persen dari kebutuhan

bisnis dan kebutuhan informasi atau indikator bisnis utama dipenuhi oleh bisnis aplikasi yang digunakan. Akhirnya, menentukan rekomendasi awal untuk semua bidang TI untuk memasukkan ke arah TI.

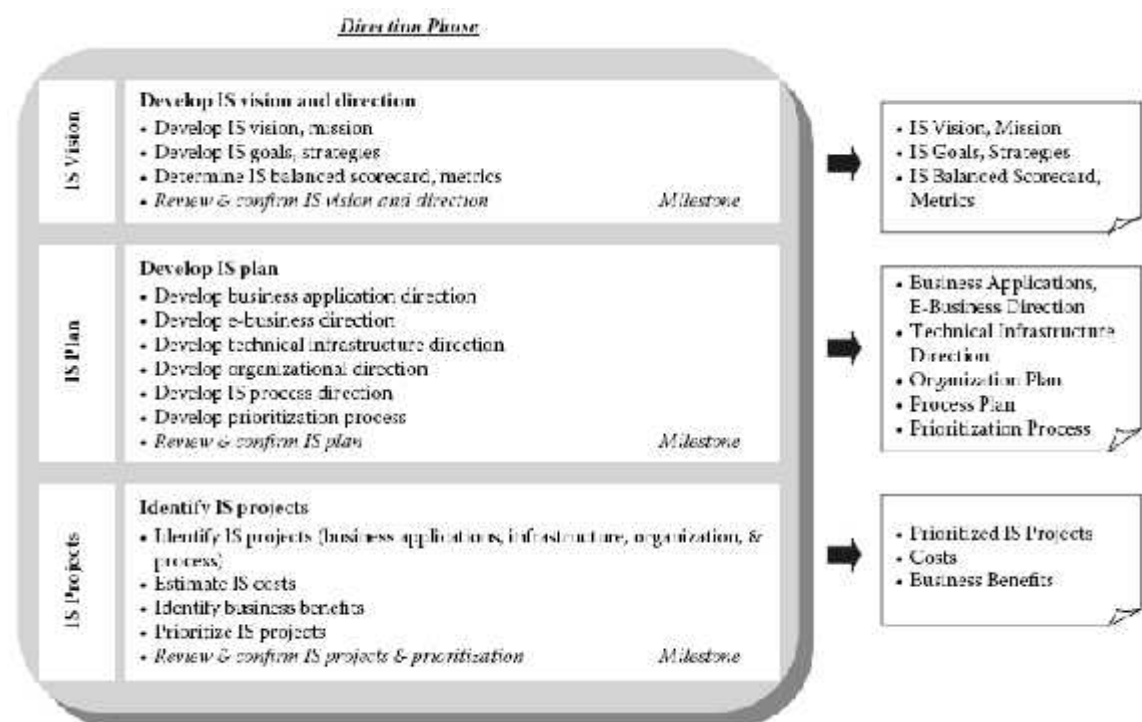


**Gambar 2.12 Fase analisa**

### 2.9.5 Direction

Ini adalah fase di mana arah misi dan visi untuk TI diartikulasikan menggunakan situasi bisnis dan arah sebagai dasar. Merumuskan tujuan strategis yang diperlukan untuk membantu usaha dalam mencapai tujuannya. Mengkaji setiap tujuan bisnis dan menentukan cara dimana TI dapat membantu bisnis dalam mencapai setiap tujuan. Ini adalah fase di mana arah misi dan visi untuk TI diartikulasikan menggunakan situasi bisnis dan arah sebagai dasar. Merumuskan tujuan strategis yang diperlukan untuk membantu usaha dalam mencapai tujuannya. Mengkaji setiap tujuan bisnis dan menentukan cara dimana TI dapat membantu bisnis dalam mencapai setiap tujuan. Langkah utama adalah untuk

menentukan bagaimana untuk mengukur nilai atau kemajuan TI secara berkelanjutan. Menentukan arah aplikasi bisnis dan proyek khusus yang diperlukan. Juga, menentukan teknis arsitektur komputasi dan proyek-proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan, termasuk perubahan di bidang PC, server, jaringan, dan telekomunikasi. Tentukan layanan arsitektur TI yang diinginkan, yang mencakup orang dan proses yang diperlukan dalam TI. Menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya dan peran outsourcing atau pilihan sumber alternatif. Gambar berikut menunjukkan detail fase *direction*:

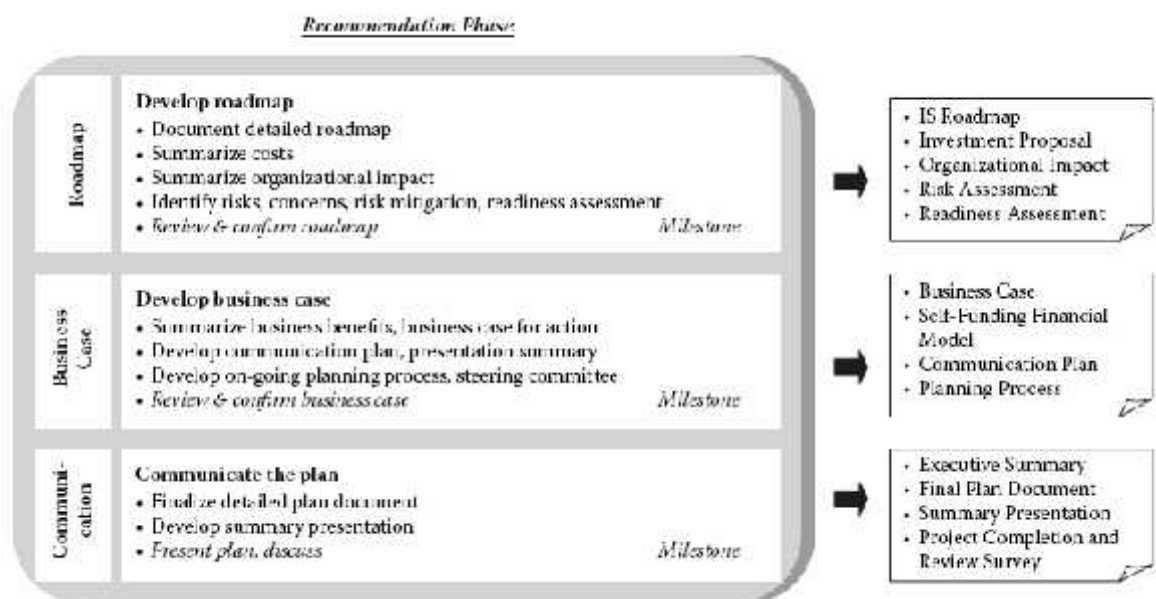


**Gambar 2.13 Fase *direction***

### 2.9.6 Recommendation

Pada fase ini, mendokumentasikan menjabarkan detail roadmap proyek untuk beberapa tahun mendatang. Merangkum biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Acuan data akan sangat membantu untuk memvalidasi perkiraan. Jika ada beberapa pilihan, identifikasi berbagai pilihan, serta keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan. Menentukan rekomendasi yang tepat

dengan analisis kembali pada investasi. Mengidentifikasi dampak organisasi. Risiko manajemen sangat penting; menganalisis risiko dan menentukan bagaimana untuk mengurangnya. Sebuah langkah penting untuk mengembangkan kasus bisnis untuk tindakan dan manfaat bisnis sehingga manajemen dapat menyetujui rencana tersebut dan memahami dampak bisnis. Selanjutnya, membangun rencana komunikasi dan proses yang berkelanjutan untuk tetap merencanakan yang *up to date*. Berikut detail fase *recommendation* dalam proses perencanaan strategis :



**Gambar 2.14 Fase *recommendation***

Pada akhirdari proses perencanaan strategis ini akan didapatkan:

- Sebuah rencana strategis teknologi informasi yang terdokumentasi dengan baik
- Sebuah keadaan bisnis yang dipahami oleh organisasi
- Sebuah arahan bisnis yang didukung oleh organisasi

Pada gambar berikut akan digambarkan isi sebuah dokumen rencana strategis teknologi informasi yang telah selesai dibuat:



*Plan Contents Sample*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Executive Summary</b></li> <li>• <b>Current Business Situation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information</li> <li>- Direction</li> <li>- Operating Vision</li> <li>- SWOT Analysis</li> </ul> </li> <li>• <b>Business/IS Link</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IS Implications</li> <li>- Key Business Measures</li> <li>- Key Business Requirements</li> <li>- Business Process Improvements</li> </ul> </li> <li>• <b>Current IS Situation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Business Application</li> <li>- Technical Infrastructure</li> <li>- Organization</li> <li>- Processes</li> <li>- Budget</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IS Industry</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IS Industry Trends</li> <li>- Manufacturing Industry</li> <li>- Benchmark Statistics</li> <li>- Competitive Profiles</li> </ul> </li> <li>• <b>IS Assessment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strengths</li> <li>- Weaknesses</li> <li>- Opportunities</li> <li>- Threats</li> <li>- Scorecard</li> <li>- Survey Results</li> <li>- Recommendations</li> </ul> </li> <li>• <b>IS High Level Direction</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vision</li> <li>- Mission</li> <li>- Goals</li> <li>- Strategies</li> <li>- Scorecard, Metrics</li> <li>- E-business Direction</li> <li>- Prioritization Process</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IS Direction</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Business Application</li> <li>- Technical Infrastructure</li> <li>- Organization</li> <li>- Processes</li> </ul> </li> <li>• <b>Implementation Plan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projects</li> <li>- Roadmap</li> <li>- Costs, Investment</li> <li>- Organizational Impact</li> <li>- Business Case, Financial Funding Model</li> <li>- Next Steps</li> <li>- Communication Plan</li> <li>- Planning Process</li> </ul> </li> <li>• <b>Appendix</b></li> </ul>
---	---	--

**Gambar 2.15** Contoh isi dokumen rencana strategis

*Table of Contents*

Phase 1: Visioning	<p>2. <b>Current Business Situation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information</li> <li>• Direction</li> <li>• Operating Vision</li> <li>• SWOT Analysis</li> </ul> <p>3. <b>Business/IS Link</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS Implications</li> <li>• Key Business Measures</li> <li>• Key Business Requirements</li> <li>• Business Process Improvements</li> </ul>	Phase 2: Direction	<p>7. <b>IS High Level Direction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vision</li> <li>• Mission</li> <li>• Goals</li> <li>• Strategies</li> <li>• Scorecard, Metrics</li> <li>• E-business Direction</li> <li>• Prioritization Process</li> </ul> <p>8. <b>IS Direction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Application</li> <li>• Technical Infrastructure</li> <li>• Organization</li> <li>• Processes</li> </ul>
Phase 2: Analysis	<p>4. <b>Current IS Situation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Application</li> <li>• Technical Infrastructure</li> <li>• Organization</li> <li>• Processes</li> <li>• Budget</li> </ul> <p>5. <b>IS Industry</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS Industry Trends</li> <li>• Manufacturing Industry</li> <li>• Benchmark Statistics</li> <li>• Competitive Profiles</li> </ul> <p>6. <b>IS Assessment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strengths</li> <li>• Weaknesses</li> <li>• Opportunities</li> <li>• Threats</li> <li>• Scorecard</li> <li>• Survey Results</li> <li>• Recommendations</li> </ul>	Phase 3: Recommendation	<p>9. <b>Implementation Plan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projects</li> <li>• Roadmap</li> <li>• Costs, Investment</li> <li>• Organizational Impact</li> <li>• Business Case, Financial Funding Model</li> <li>• Next Steps</li> <li>• Communication Plan</li> <li>• Planning Process</li> </ul> <p>10. <b>Appendix</b></p> <p>1. <b>Executive Summary</b></p>

**Gambar 2.16** Isi tabel perencanaan strategis teknologi informasi